



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tahun 2021



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR



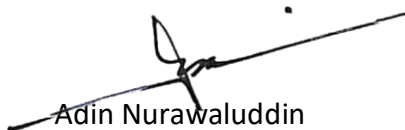
Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang tahun 2021 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian seluruh indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan nilai sebesar 105,14%, dengan kategori **“berhasil”**. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2022 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 3 (tiga) terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi” dan core value “ASN BerAKHLAK”** mewujudkan PSDKP menjadi **Tangan Kanan dan Benteng KKP** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2021.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP Tahun 2021 mencapai 105,14%, dengan kategori “berhasil”. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2021, sebagai berikut:

KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN		95,72%	
57,37%	CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU DARI KEGIATAN ILLEGAL FISHING		
PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		98,05%	
PMPRB Ditjen PSDKP	33,32	Batas Tertinggi LHP BPK	0,00
IKM Ditjen PSDKP	90,87	Maturitas SPIP	Level 3
Efektivitas Kebijakan	74,80	Pengelolaan BMN	100%
Predikat WBK	8 Unit	Kepatuhan PBJ	83,85%
IP ASN	77,91	Nilai MP	99,21%
PM SAKIP	87,64	TL Rekomendasi Itjen	87,64
INOVASI	1 Unit	IKPA	92,31
		NKA	89,27

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan prioritas tahun 2021 antara lain: Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, Patroli pesawat, pembangunan kapal pengawas dan speedboat pengawas, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran pasca *refocusing* Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 739.473.672.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.732.356.228.588; atau 99,04%.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar



Ikhtisar Eksekutif



Bab I
Pendahuluan



Bab II
Perencanaan Kinerja



Bab III
Akuntabilitas Kinerja



Bab IV
Penutup



Lampiran



LAKSAMANA MUDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

UMUM

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Menteri Kelautan dan Perikanan secara khusus telah memberikan 2 (dua) arahan kepada Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap KIA pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*
2. Penertiban dan penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan

Arahan khusus diatas dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sistem pengawasan terpadu berbasis *IoT (Internet of things)*
2. Penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan
3. Penurunan pelanggaran di wilayah penangkapan dan penurunan kegiatan *illegal fishing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1	Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
6	Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal		
7	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri		

STRUKTUR ORGANISASI



TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;

**Tugas :
Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.**

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;

**Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada**

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

**Tugas :
Melaksanakan
perumusan dan
pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma,
standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi
dan pelaporan di bidang
pengawasan
pengelolaan sumber
daya kelautan**

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Direktorat Penanganan Pelanggaran

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;

Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP

Tugas :
Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Fungsi :**
- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
 - d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
 - e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

PERMASALAHAN PENGAWASAN SDKP

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang selama ini dilakukan oleh aparaturnya Ditjen. PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah

perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2021
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021	BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

VISI

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

MISI

- 1** Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2** Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3** Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4** Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

- 1 Tata Kelola SDKP bertanggungjawab
- 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif
- 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Program 1										
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
Indikator Kinerja					Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat									
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)				Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat									
	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan				Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif									
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)				Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)				Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas									
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)				Persentase	93	93	93	93	93
Program 2										
Dukungan Manajemen										
Indikator Kinerja					Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP									
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)				Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)				Unit	4	5	6	7	8

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76
Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1
Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2021 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan indikator kinerja tahun 2021 sebagaimana dibahas dibawah ini.

Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2020 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP juga dengan memperhatikan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021, telah dilakukan perubahan jumlah indikator kinerja dari 16 menjadi 18. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024. Pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2021	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021
IKU1. Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	Tidak ada
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)

Pada periode triwulan III Tahun 2021, sejalan dengan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan refocusing anggaran keempat, maka Ditjen PSDKP melakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* (%)” dari 60% menjadi 54,50%. Dasar utama perubahan target tersebut adalah berkurangnya hari operasi Kapal Pengawas dari 122 hari menjadi 103 hari, serta hari operasi speedboat dari 40 hari menjadi 25 hari. Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran Program 1			
Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.1	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	95%

Sasaran Program 2			
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	Persentase	54,50%
2.2	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase	93%
Sasaran Program 3			
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	31
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	80
3.3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
3.4	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	8
3.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	73
3.6	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	87,15
3.7	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public	unit	1
3.8	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020	Persentase	1
3.9	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3
3.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	72,5
3.11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	72,5

3.12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	Persentase	84
3.13	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Persentase	65
3.14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	89
3.15	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program Ditjen. PSDKP sebesar **105,14%**, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja.

REALISASI DAN CAPAIAN KNERJA UTAMA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Sasaran Program 1 Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab	IKU 1. Persentase Kepatuhan (Compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	100,75%	Target 95%	Realisasi 95,72%
Sasaran Program 2 Pengawasan SDKP yang terintegratif	IKU 2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	105,27%	Target 54,50%	Realisasi 57,37%
	IKU 3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	105,43%	Target 93%	Realisasi 98,05%
Sasaran Program 3 Tata Kelola Pemerintahan				
IK 4. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP		Target 31%	Realisasi 33,32%	107,19%
IK 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP		Target 80%	Realisasi 90,87%	113,59%

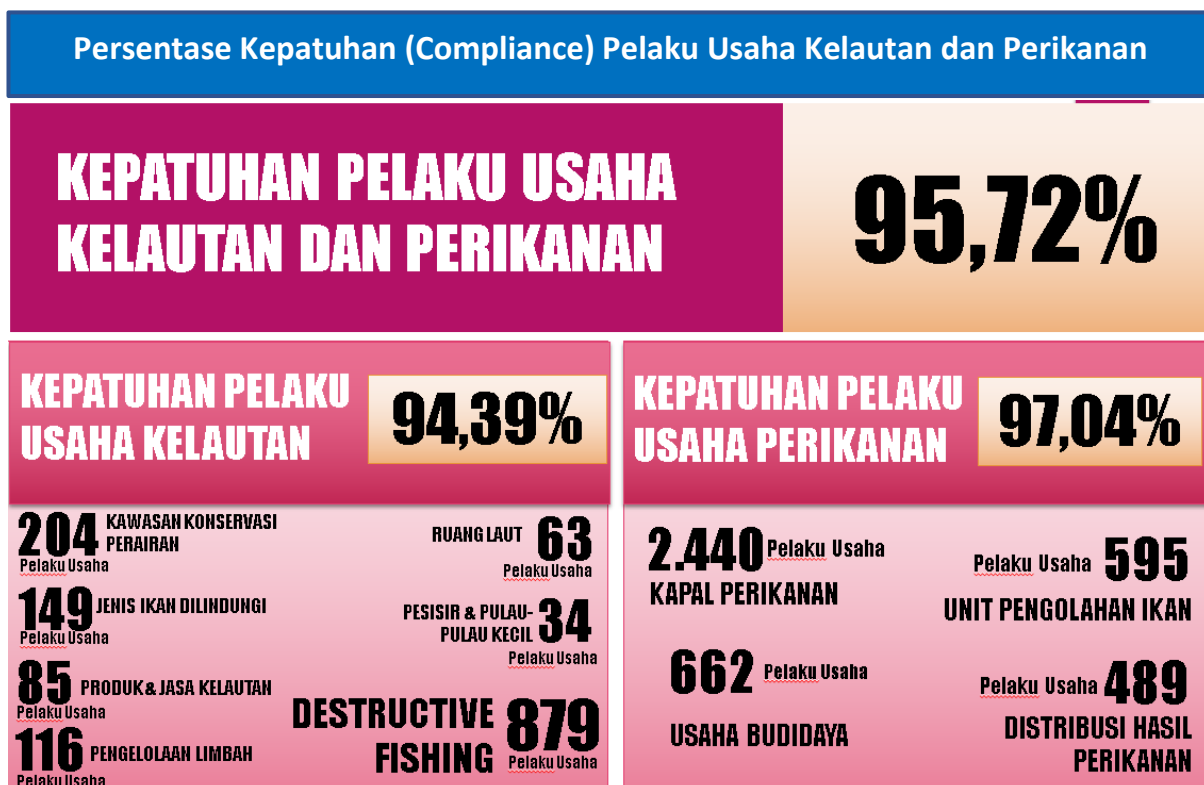
106,86%	Target 70% Realisasi 74,80%	IK 6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP
IK 7. Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen	Target 8 unit Realisasi 8 unit	100%
106,73%	Target 73 Realisasi 77,91	IK 8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)
IK 9. Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Target 87,15 Realisasi 87,64	100,56%
106,86%	Target 1 unit Realisasi 1 unit	IK 10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik
IK 11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020	Target 1% Realisasi 0,00%	120%
100%	Target level 3 Realisasi Level 3	IK 12. Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP
IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Target 72,5% Realisasi 100%	120%
120%	Target 72,5% Realisasi 83,85%	IK 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

IK 15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	Target 84% Realisasi 99,21%	118,11%
120%	Target 65% Realisasi 89,16%	IK 16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP
IK 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Target 89 Realisasi 92,31	103,63%
120%	Target 86 Realisasi 89,27	IK 18. Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP

EVALUASI DAN ANALISIS

SASARAN PROGRAM 1

TATA KELOLA SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERTANGGUNGJAWAB



Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 95,72% melebihi target 95%. Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan diperoleh dari rata-rata kepatuhan usaha kelautan sebesar 94,39% dan pelaku usaha perikanan sebesar 97,04%. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2020 serta target jangka menengah atau rencana strategis Ditjen PSDKP 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan”

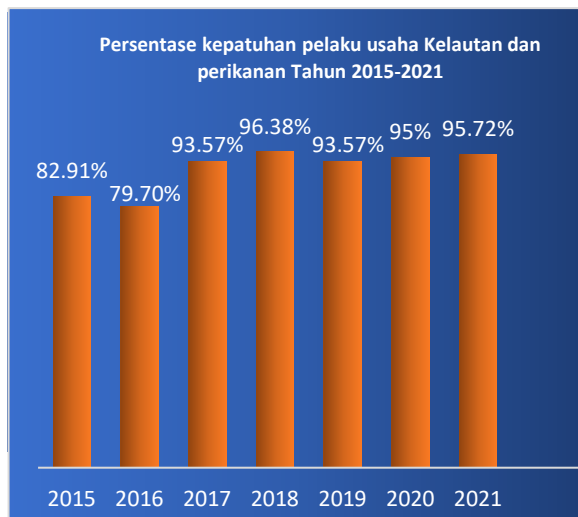
Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU 1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	94%	94,76%	95%	95,72%	98%	95,72%

Ket: T=Target, R=Realisasi

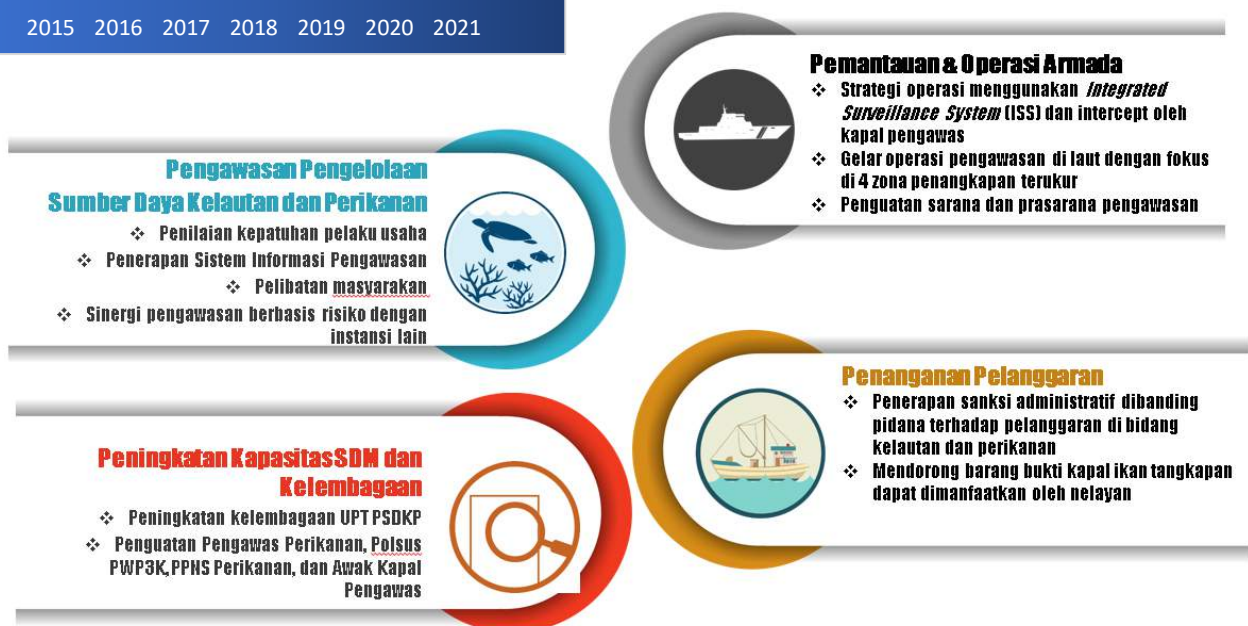
Realisasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan tahun 2021 tercapai dan jika dibandingkan Realisasi tahun 2021 meningkat sebesar 0,95% dari realisasi Tahun 2020, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Konsistensi Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha;
- Peningkatan kapabilitas SDM pengawasan SDKP melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan.
- Kegiatan penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada masyarakat melalui program PSDKP mengajar dalam bentuk Kampanye maupun sosialisasi khususnya di wilayah yang rawan terjadi praktik *illegal* dan *destructive fishing*.
- Kerjasama yang terjalin dengan instansi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah daerah;
- Inovasi pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Surat Laik Operasi (SLO), sehingga mempermudah dan mempercepat proses penerbitan dokumen.





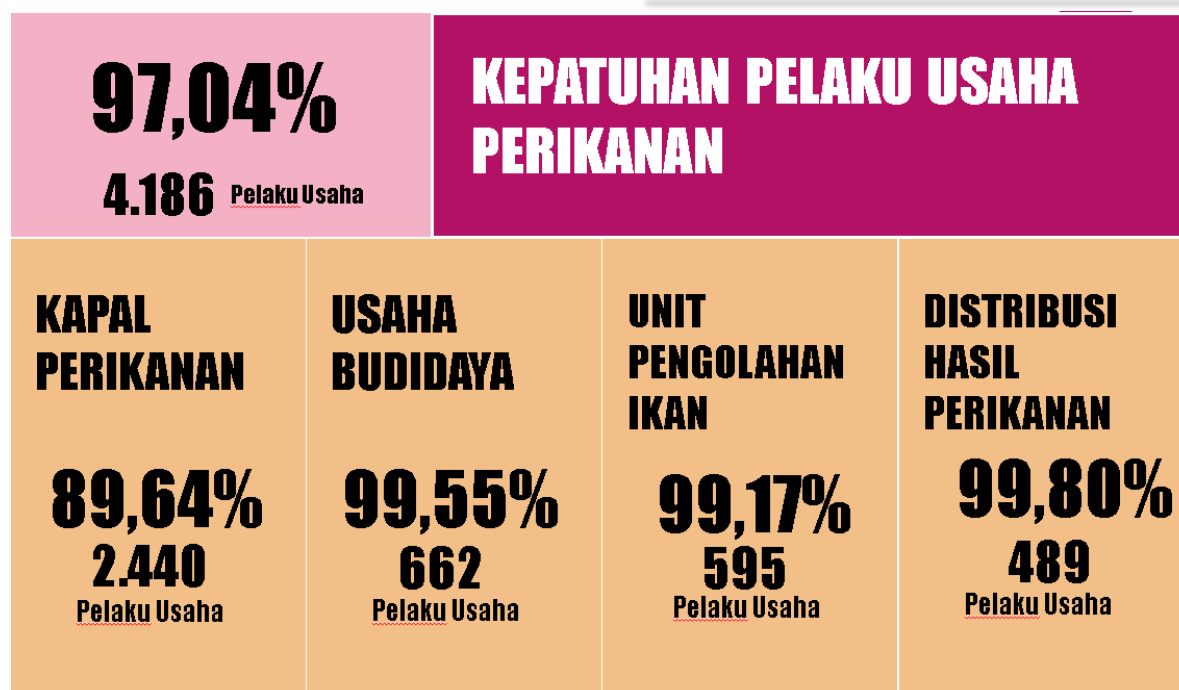
Proyeksi kepatuhan pada akhir tahun 2024 sebesar 98% optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP berupaya terus konsisten melaksanakan pengawasan SDKP sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan perikanan khususnya untuk mengawal penangkapan ikan terukur. Mengingat tantangan pengawasan SDKP tersebut, maka perlu diupayakan strategi dan inovasi pengawasan SDKP, sebagai berikut:



Khusus untuk kegiatan pengawasan penangkapan ikan dirumuskan strategi sebagai berikut:

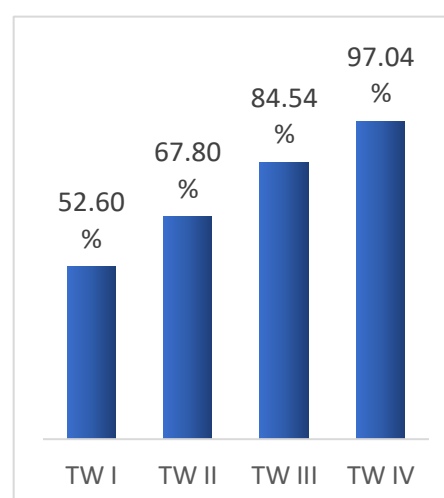
- Pengawasan sebelum pelaksanaan penangkapan (*Before Fishing*) melalui: pemeriksaan kelayakan teknis dan administrasi (dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, awak kapal, aktivasi VMS), kuota yang diberikan. Apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi sudah sesuai, maka Pengawas perikanan menerbitkan SLO.
- Pengawasan aktivitas penangkapan ikan (*While Fishing*) dilaut oleh Kapal Pengawas Perikanan serta didukung informasi dari Pusat pengendalian (VMS, AIS, Radar) dan pesawat patroli;
- Pengawasan kapal saat mendaratkan hasil tangkapan (*during landing*) melalui pemeriksaan: jenis, jumlah & ukuran hasil tangkapan, kesesuaian alat penangkap, kesesuaian pelabuhan pangkalan, *tracking* VMS.
- Pengawasan setelah dilakukan pembongkaran (*Post Landing*) melalui pengawasan distribusi dan pengolahan hasil perikanan.

KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN



Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pencapaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 95%, yang diperoleh dari kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan 89,64%, pelaku usaha budidaya 99,55%, pelaku usaha 99,17% dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan 99,80%. Dari keempat jenis pelaku usaha perikanan tersebut, terdapat satu komponen pelaku usaha kapal perikanan tidak mencapai target hanya sebesar 89,64%. Apabila melihat tren dari tahun 2020 kepatuhan pelaku usaha perikanan meningkat sebesar 0,17%, begitu juga realisasi setiap triwulan selalu meningkat.

Kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan diperoleh dari tiga komponen utama yaitu kelaikan kapal perikanan dengan diterbitkannya surat laik operasi (SLO); kepatuhan terhadap SPKP dan tidak di Adhoc Kapal Pengawas. Komponen kelaikan pelaku usaha yang patuh sejumlah 2.440 pelaku usaha atau 100%. Sedangkan yang membuat rendahnya kepatuhan adalah kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan disebabkan banyaknya yang diberikan peringatan karena terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan kapal perikanan melalui sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) yaitu sejumlah 197 pelaku usaha atau 69,86% dari 282 pelaku usaha.



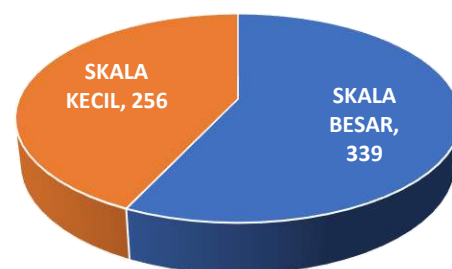
Sementara itu berdasarkan kapal yang diad hoc oleh Kapal pengawas sebanyak 28 Pelaku usaha atau sekitar 9,93% juga mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan maka perlu dilakukan pengawasan dan sosialisasi mengenai ketentuan yang berlaku serta penindakan tegas apabila terbukti masih tidak patuh. Strategi dan inovasi pengawasan perlu dilakukan terlebih pada tahun 2022 harus mengawal penangkapan ikan terukur.

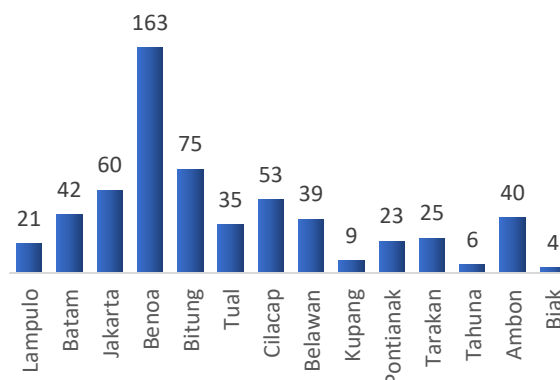
Dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan didukung oleh kegiatan utama pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kapal Perikanan. Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Pengawasan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang ditetapkan.
2. Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan. Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Sepanjang tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 595 pelaku usaha, dari 600 pelaku usaha.

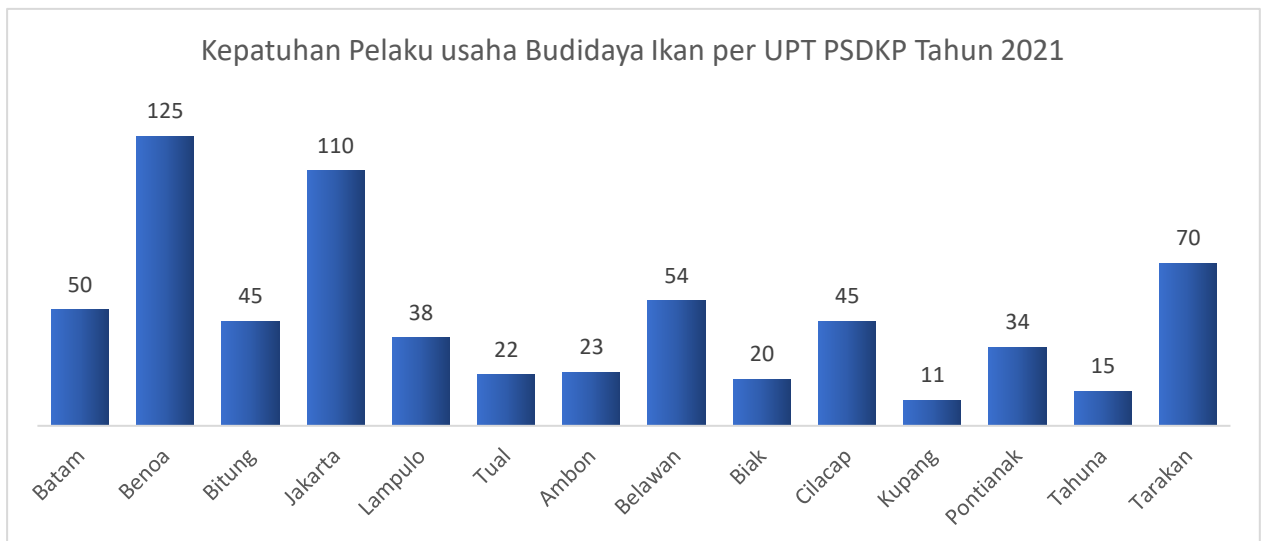
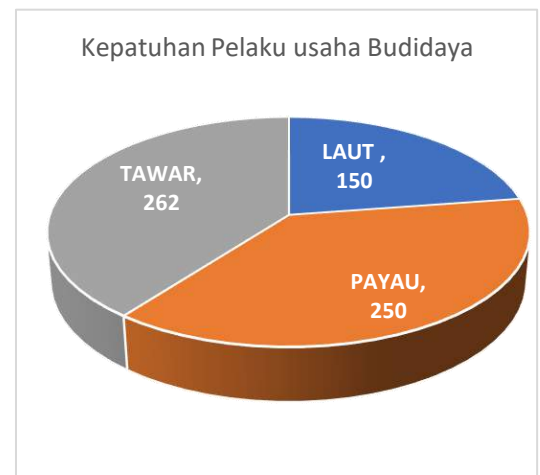
Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan



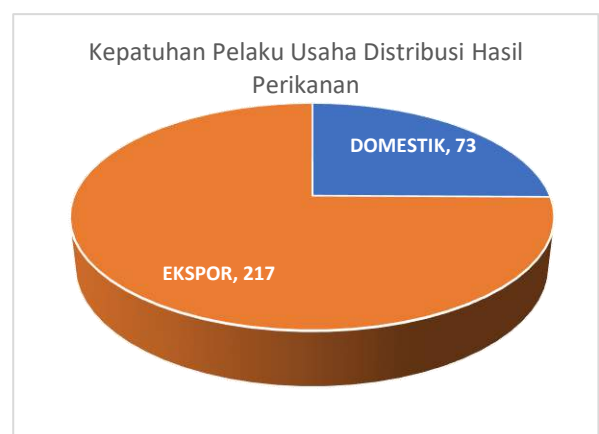
Kepatuhan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan per UPT PSDKP Tahun 2021



3. Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan usaha, sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan, jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut, kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan oleh pengawas perikanan sampai tahun 2021 diperoleh sebanyak 662 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 665 pelaku usaha. Usaha budidaya ikan yang dilakukan pengawasan terdiri dari budidaya air laut, payau dan tawar.

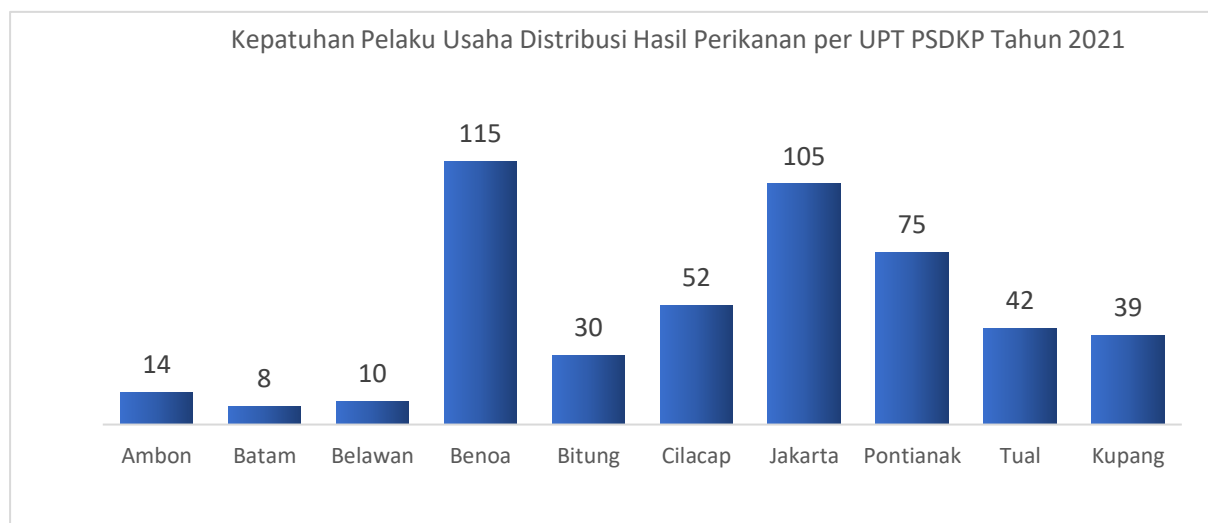


4. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

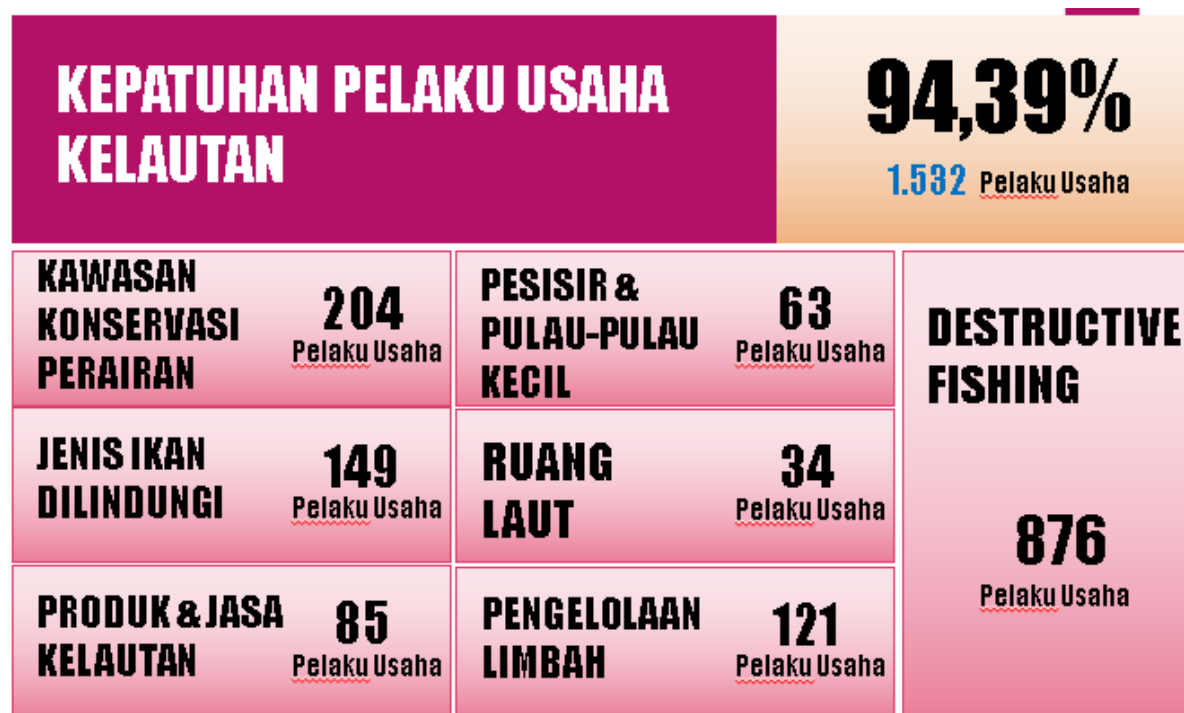


Sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 489 pelaku usaha yang patuh, dari 490 pelaku usaha. Hanya satu pelaku usaha yang tidak patuh dan sudah diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi

peruntukkan domestik dan ekspor serta di Pasar, supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan.



KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN



Kepatuhan pelaku usaha kelautan tercapai sebesar 94,39% tidak tercapai sesuai target 95%. Tahun 2021 pelaku usaha kelautan yang patuh sejumlah 1.532 pelaku usaha dari hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan sebanyak 1.623 pelaku usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah pelaku usaha yang diawasi sejumlah 702 pelaku usaha meningkat di tahun 2021, begitupula dengan Kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2021 meningkat

dari tahun 2020 sebesar 92,65%. Begitu juga halnya Apabila dilihat tren realisasi kinerja triwulanan tahun 2021, setiap periodenya mengalami kenaikan .

Ketidakpatuhan pelaku usaha kelautan dinominasi oleh persyaratan perizinan yang belum dipenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi dari tujuh objek pengawasan sebanyak lima objek yang tidak tercapai kepatuhannya yaitu: 1)Kawasan Konservasi; 2)Produk dan jasa kelautan; 3)Pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) Ruang laut; dan 5)pengelolaan Limbah. Ketidaktercapaian kepatuhan ini juga disebabkan oleh frekuensi pengawasan meningkat di lokasi yang sama kemudian pelaku usaha yang diawasi sebagai besar adalah baru, namun tetap dimasukan sebagai capaian kinerja.

Sebagai salah satu upaya perbaikan kedepan, khusus pelaku usaha tidak patuh pada tahun 2021 perlu menjadi target utama pengawasan tahun 2022, sehingga pelaku usaha patuh terhadap peraturan-perundang-undangan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja di tahun 2021 perlu tetap dilakukan dan dioptimalkan khususnya bagi pelaku usaha baru. Namun dengan adanya ketentuan baru yaitu terbitnya undang-undang cipta kerja dan turunannya, maka perlu dirumuskan strategi pengawasan serta penetapan pelaku usaha yang akan diawasi, antara lain:

1. **Pre-emptive** melalui kampanye, sosialisasi, SDK mengudara.
2. **Preventive** melalui patroli dan pengawasan lapangan (UPT Pangkalan/Stasiun), supervisi pengawasan.
3. **Represive** penindakan pelanggaran melalui Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, dan Sanksi Pidana.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

- a) Pengawasan pemanfaatan Kawasan konservasi. Pada tahun 2021, pengawasan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi a)TWP Pulau Pieh; b)TWP Kapoposang; c)TNP Laut Sawu; d)SAP Waigeo; e)TWP Gili Matra; f)TWP Laut Banda; g)SAP Raja Ampat; h)TWP Anambas; i)TWP Padaido; j)SAP Aru Tenggara. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 204 pelaku usaha patuh dari 217 pelaku usaha yang



diverifikasi. Pelaku usaha yang diawasi terdiri dari kapal perikanan, penambang pasir, pengangkutan material yang melakukan aktivitas di Kawasan konservasi.

- b) Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 153 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 14 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 149 pelaku usaha patuh dan hanya 4 yang tidak patuh. Jenis ikan yang berhasil diawasi tahun 2021 antara lain : penyu dan turunannya, pari manta, hiu paus, kima, bambu laut, ikan napoleon, ikan hiu paus, dan karang hias.
- c) Pengawasan pemanfaatan produk kelautan dan jasa kelautan. Pada tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 100 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 41 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 85 pelaku usaha patuh dan 15 tidak patuh. Pelaku usaha yang diawasi adalah penambang pasir dan usaha wisata tirta. Kepada pelaku usaha direkomendasikan untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan.
- d) Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 1) Pengawasan pemanfaatan pesisir. Pengawasan pemanfaatan pesisir berfokus kepada pengawasan kepatuhan pelaku usaha alih fungsi lahan dan reklamasi terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021, pengawasan pesisir dilaksanakan terhadap 17 Pelaku usaha, hasil verifikasi menunjukkan 15 pelaku usaha patuh, 2 pelaku usaha tidak patuh karena kegiatan reklamasi sudah dilaksanakan namun izin kegiatan belum ada.
 - 2) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil (pariwisata/wisata bahari/budidaya laut) terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 53 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 22 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 48 pelaku usaha patuh dan 5 tidak patuh karena belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan. Sebagian besar pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah pelaku usaha pariwisata penginapan/resort/villa yang dimiliki oleh pemodal asing.
- e) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut. Pengawasan jasa kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha bahari (pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/ budidaya laut/KJA) terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 37 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 8 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh sebanyak 34 pelaku usaha patuh dan 3 tidak patuh.
- f) Pengawasan perikanan dan nonperikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Pengawasan dilaksanakan melalui kepatuhan dokumen perizinan lingkungan, keberadaan Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) dan kesesuaian IPAL yang terpasang. Sampai dengan tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap

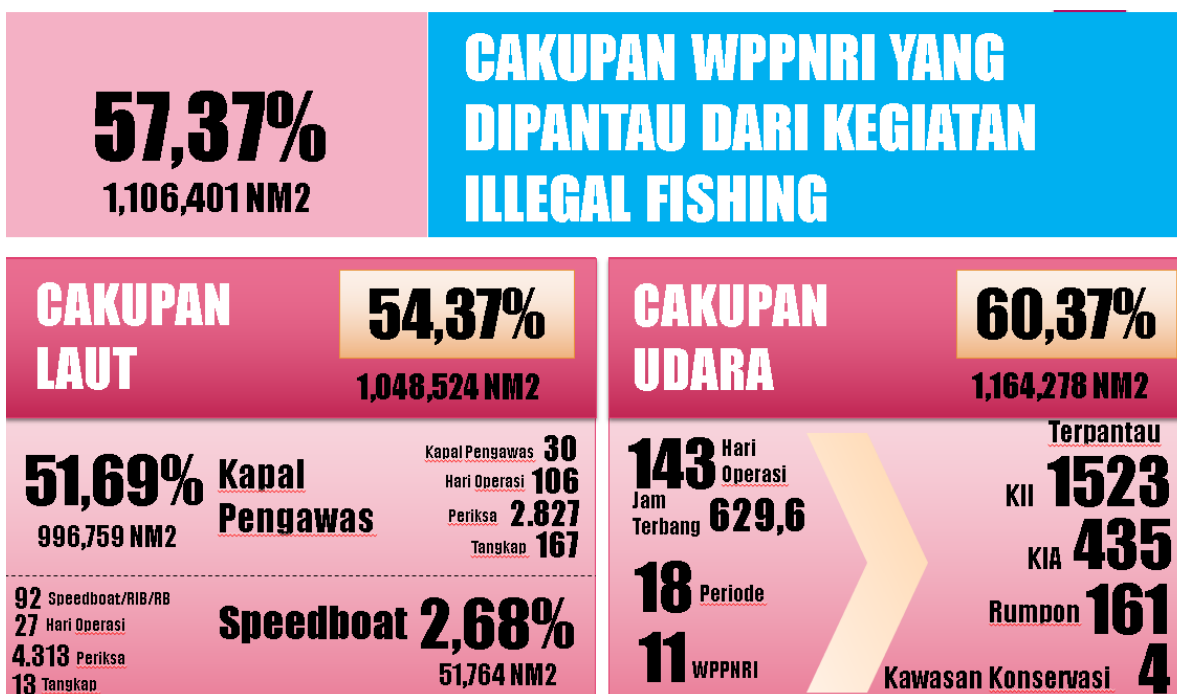
132 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 43 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 121 pelaku usaha patuh dan 11 yang tidak patuh karena belum memiliki IPAL sesuai dengan yang ditetapkan. Pelaku usaha yang tidak patuh direkomendasikan untuk segera membuat IPAL dan mengoperasikannya sesuai dengan dokumen perizinan lingkungannya.

- g) Pengawasan kegiatan perikanan yang patuh peraturan pelarangan *destructive fishing*. Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaku usaha kegiatan penangkapan ikan di bawah 10 GT. Adapun kriteria kepatuhan adalah keberadaan alat yang diduga dapat menyebabkan *destructive fishing* antara lain bom, setrum, dan racun. Sampai dengan tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 914 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 876 pelaku usaha patuh dan 38 yang tidak patuh. Ketidakpatuhan pelaku usaha terjadi karena ditemukan alat/bahan penyetrum, bus dan peledak. Terhadap para pelaku yang tidak patuh dilakukan penangkapan sebanyak 24 kasus bom, 4 kasus ikan, 4 kasus strum.

SASARAN PROGRAM 2

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG TERINTEGRATIF

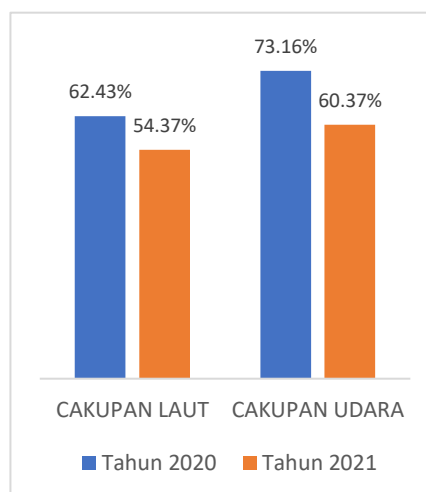
IKU 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari *illegal fishing*



Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated*

Fishing [IUU Fishing] yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI].

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*” sebesar 57,37% dari Tahun 2021 sebesar 54,50 %. Cakupan WPPNRI yang mampu diawasi diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua) cakupan yakni: (1) Cakupan pengawasan di laut dengan menggunakan 30 Kapal Pengawas dan 92 *Speedboat* pengawas (termasuk RIB, *Rubber Boat*, *Sea rider*) sebesar 54,37% atau seluas 1,048,524 nm²; dan (2) Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 60,37% atau seluas 1.164.278 nm². Capaian kinerja Tahun 2021 mengalami penurunan 9,81% dari capaian Tahun 2020 yang disebabkan salah satu kapal pengawas perikanan yaitu Orca 001 tidak dapat beroperasi maksimal karena kerusakan mesin utama, sehingga cakupan laut yang diawasi tidak optimal. Selain itu Jumlah speedboat yang beroperasi pada tahun 2021 berkurang dari tahun 2020 sejumlah 120 unit. Salah upaya yang dilakukan dengan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap Kapal Pengawas Orca 001, sedangkan hari operasinya dialihkan untuk Kapal pengawas yang lain.



Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, perlu dioptimalkan operasi seluruh kapal pengawas dengan memperhatikan kondisi teknis kapal sehingga tidak terjadi kerusakan berat. Termasuk operasional dan perawatan secara berkala speedboat pengawasan yang dioperasikan oleh UPT Pengawasan SDKP.

Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2021 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing*”

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU2. Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	54,18%	67,18%	54,50%	57,37%	75%	57,37%
%Capaian	120%		105,27%		76,47%	

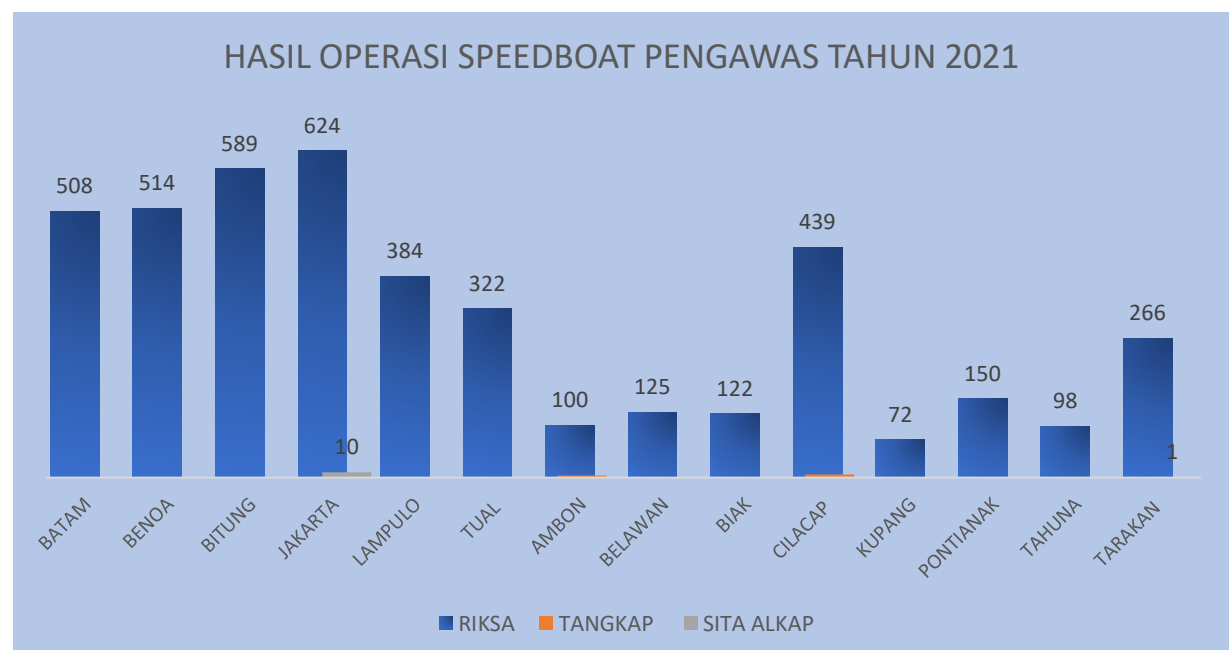
Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian kinerja setiap periode triwulanan ditahun 2021 selalu meningkat seiring dengan hari operasi kapal pengawas, speedboat dan pesawat patroli, sebagai berikut:

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja adalah Operasi Kapal pengawas Perikanan, Speedboat pengawas dan pesawat patroli. Pada tahun 2021, rata-rata hari operasi 30 kapal pengawas sebanyak 106 hari dan rata-rata hari operasi 92 speedboat pengawasan sebanyak 27 hari. Berdasarkan hasil operasi di laut sepanjang tahun 2021 berhasil dilakukan pemeriksaan oleh kapal pengawas sebanyak 2.827 Kapal (2.760 KII, 67 KIA), dan sebanyak 167 kapal (114 KII, 53 KIA) ditangkap dan di proses hukum.



Sementara itu, melalui operasi speedboat pengawas telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 4.313 kapal (4.312 KII, 1 KIA), 13 Kapal ditangkap dan 11 alat tangkap disita.



Pengawasan melalui udara dilakukan sebanyak 18 periode dengan menggunakan pesawat di 13 pangkalan operasi selama 143 hari operasi dengan cakupan pemantauan meliputi 11 WPPNRI. Hasil pengawasan pesawat udara diantaranya: a)Validasi kepatuhan Kapal perikanan terhadap SPKP sebanyak 1.523 KII; b)Pemantauan Kapal Ikan Asing sebanyak 435 kapal asal Vietnam, Filipina dan China. Pengawasan melalui udara dilakukan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas.



Walaupun capaian kinerja tercapai melebihi target, sebagai upaya peningkatan kualitas capaian kinerja perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas secara rutin terkait dengan sinkronisasi data dengan unit pelaksana teknis pengawasan SDKP. Hal yang sama perlu dilakukan juga pada pengawasan SDKP melalui udara disertai konsistensi penyajian data hasil pengawasan setiap periode operasi.

IKU 3. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

98,05%

PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

98,37%

167
Proses hukum

138 TPP
29 TPK

16 penyidikan
2 sidang
3 kasasi
146 inkrah

PENANGANAN BARANG BUKTI

99,53%

159
Barang Bukti

144 Penyerahan
Tahap II
(selesai)
15 Perawatan dan
Pengamanan
Barang Bukti

PENANGANAN AWAK KAPAL

95,93%

1.218
Awak Kapal

109 Penyerahan
Tahap II
(selesai)

46 Merawat dan
mengamankan
Awak Kapal

6 Pendataan dan
Penempatan
Awak Kapal

Capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan sebesar 98,05% diperoleh dari penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan 98,37% dan penanganan barang bukti dan awak kapal 97,73% (rata-rata penanganan barang bukti 99,53% dan penanganan awak kapal 95,93%). Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari perkembangan proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan, mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara itu, penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan capaian perkembangan tahapan penanganan barang bukti pelaku TPKP berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Sedangkan penanganan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Setiap tahapan proses penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2021 serta target jangka menengah atau rencana strategis tahun 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.3.

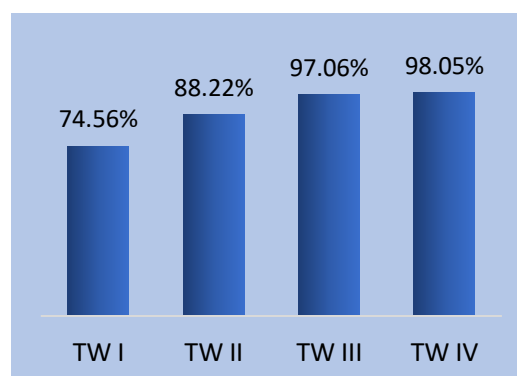
Tabel 3.3.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU3. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	93%	86,78%	93%	98,05%	93%	98,05%
%Capaian	93,31%		105,43%		105,43%	

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Realisasi penanganan pelanggaran tahun 2021 meningkat tajam sebesar 11,27% dari tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan kinerja positif sekaligus sebagai upaya tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan pada periode sebelumnya. Tingginya capaian kinerja tahun 2021 juga dipengaruhi oleh semakin tertibnya penanganan barang bukti dan awak kapal sehingga terdokumentasikan dengan baik, dimana kondisi ini tidak dilakukan pada tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja di atas tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun sebelumnya (tahun 2015-2019) karena capaian kinerja diperoleh berdasarkan satu komponen utama yaitu penyelesaian kasus TPKP yang terjadi.



PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP

Salah satu kontribusi besar tingginya capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP). Persentase penyelesaian penyidikan TPKP merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setiap tahapan proses penyidikan diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

98,37%

167

Proses hukum

138 TPP
29 TPK

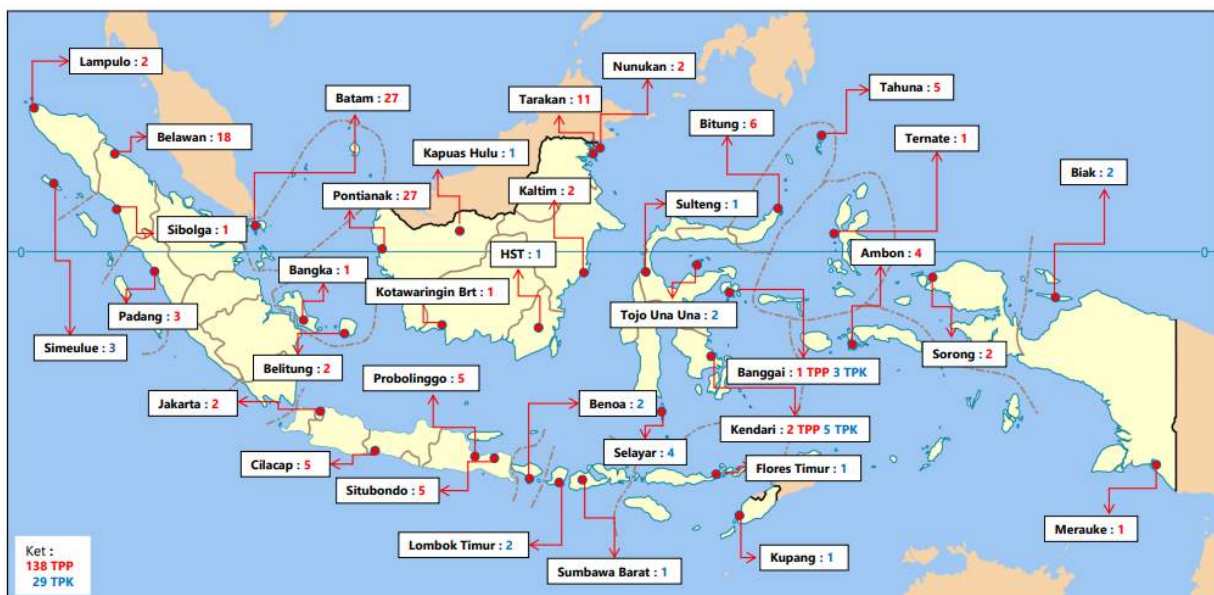
16 penyidikan

2 sidang

3 kasasi

146 inkrah

Pada tahun 2021, jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang diproses hukum sebanyak 167 kasus, dengan jumlah kasus yang sudah mencapai Tahap 2 dan inkrah (100%) sebanyak 151 kasus. Kasus yang ditangani didominasi oleh pelanggaran perikanan sebesar 82,63% (138 kasus) yang merupakan kapal pelaku *illegal fishing* yang ditangkap oleh Kapal pengawas, sisanya pelanggaran dibidang kelautan (29 kasus). Berdasarkan lokasi penyidikan kasus paling banyak ditangani di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 31 kasus dan Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 30 kasus. Hal tersebut dipengaruhi banyak hasil tangkapan kapal pengawas di perairan Natuna yang merupakan Kapal Ikan Asing asal Vietnam dan Malaysia.



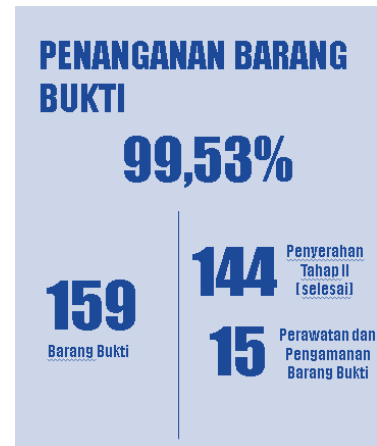
Banyaknya kasus yang selesai proses penyidikan tidak terlepas dari peningkatan profesionalitas PPNS yang menangani dan adanya supervisi yang dilakukan secara rutin oleh Pusat. Kegiatan supervisi penyidikan yang selama kurun waktu tahun 2021 dilakukan terhadap 149 kasus, yang ada di UPT Ditjen PSDKP terdiri dari 121 kasus tindak pidana perikanan dan 28 kasus tindak pidana kelautan. Supervisi tersebut tidak dilakukan terhadap

semua kasus yang disidik oleh PPNS namun hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang dianggap sulit atau ada permasalahan di lapangan dan ada permintaan supervisi dari PPNS Perikanan/Kepala UPT.

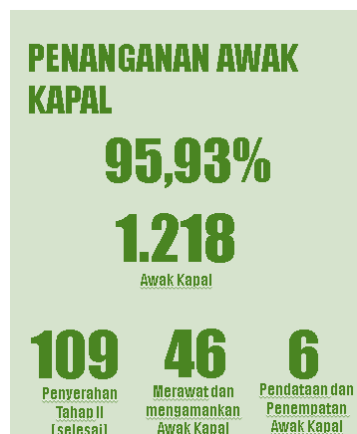
PENANGANAN BARANG BUKTI

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu 2021 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 159 unit, termasuk peningkatan barang bukti yang selesai ditangani sebanyak 144 unit. Kondisi ini juga yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja tahun 2021.



PENANGANAN AWAK KAPAL



Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada tahun 2021, penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai sebesar 95,53% merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT. Sampai dengan Tahun 2021, awak kapal yang ditangani sejumlah 1.277 orang bertambah 118 orang dari triwulan II terdiri dari tersangka, saksi dan non justisia. Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya.

Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya. Hal tersebut memerlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi satker pusat selaku koordinator kegiatan dengan para PPNS perikanan yang melakukan penyidikan TPKP dilapangan;

2. Meningkatkan koordinasi dengan kepala UPT PSDKP dan jajarannya agar penanganan barang bukti dan awak kapal berjalan sesuai dengan ketentuan;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait lain apabila diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

SASARAN PROGRAM 3

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Indikator Kinerja 4					
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen					
No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,74	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,91	3,75	3,75
5	Penataan Sistem SDM	1,40	1,37	2,00	1,56
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,31	3,75	2,83
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,91	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,08	3,75	3,33
	Nilai	14,60	13,31	21,70	19,92
	Nilai PMPRB (Pemenuhan+ reform)	33,23 dari total bobot 36,30 atau 91,54%			

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Berdasarkan berita acara hasil konsesus penilaian mandiri

Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal KKP Nilai PMPRB Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 33,23 dari target 31, meningkat sebesar 0,05% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Nilai capaian tahun 2021 menunjukkan Ditjen PSDKP sudah menjalankan reformasi birokrasi dengan baik dengan pencapaian di setiap aspek di pemenuhan dan reform mencapai nilai

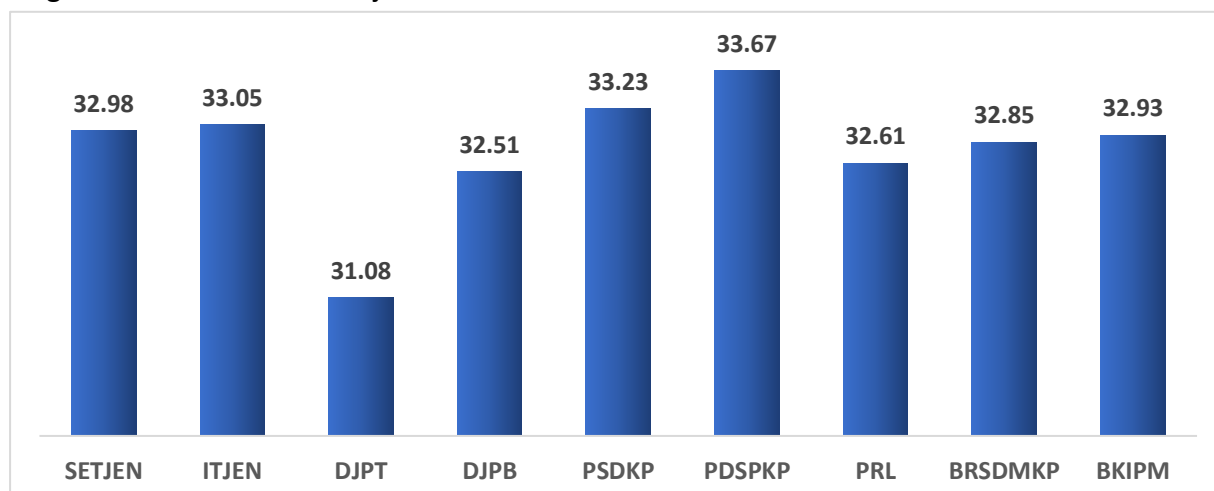


yang tinggi dari bobot yang ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing aspek yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Sebagai upaya perbaikan ke depan maka perlu mempertahankan capaian pada tahun 2021 serta dengan meningkatkan 2 (dua) aspek yang belum maksimal antara lain aspek reform yaitu area penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen SDM.

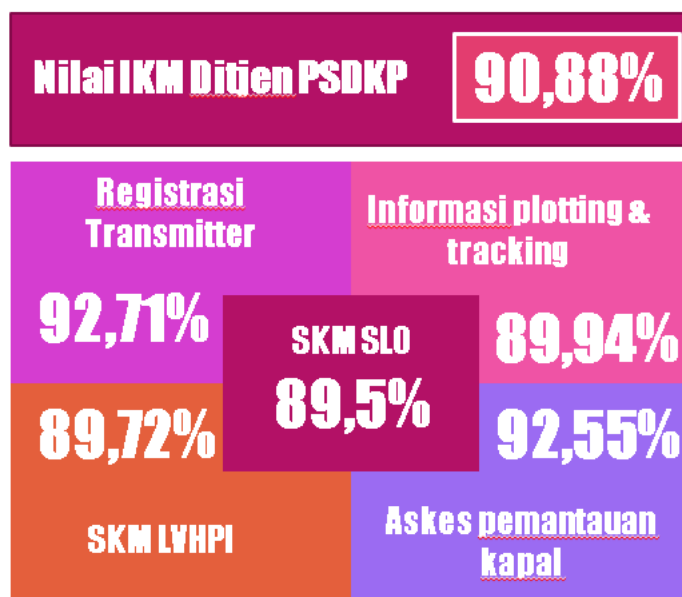
Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi diantaranya pada area Manajemen Perubahan dengan menggiatkan agen perubahan sebagai pionir perubahan di masing-masing unit kerja lingkup Ditjen PSDKP. Agen perubahan ini juga memiliki forum agen perubahan baik lingkup Ditjen PSDKP maupun lingkup KKP sehingga pertukaran informasi dan sharing antar agen perubahan juga dapat diakomodir dengan baik khususnya lingkup Ditjen PSDKP. Berikutnya upaya perbaikan juga dilakukan melalui upaya internalisasi dan implementasi budaya kerja Ditjen PSDKP yang juga selaras dengan budaya kerja ASN BerAKHLAK.

Pada area penguatan organisasi Ditjen PSDKP juga menjadi bagian dalam upaya penyederhanaan birokrasi lingkup KKP dengan penyetaraan jabatan struktural dan beralih ke jabatan fungsional bagi eselon III dan eselon IV menjadi koordinator dan sub koordinator serta mengemban amanah sebagai pejabat fungsional dengan ejnsi jabatan disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Selanjutnya pada area deregulasi kebijakan Ditjen PSDKP telah melakukan revisi terhadap enam Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat. Pada area penataan tata laksana Ditjen PSDKP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 268 SOP kegiatan dimana sembilan diantaranya merupakan SOP kegiatan utama. Untuk area penataan SDM Ditjen PSDKP telah menerapkan penetapan kinerja individu terhadap seluruh pegawai lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2020 dan Tahun 2021. Dan pada area pelayanan publik Ditjen PSDKP mendukung inovasi pelayanan publik di masing-masing Unit Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP.

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati urutan ketiga dari Sembilan Unit kerja eselon I.



Indikator Kinerja 5 Indeks Kepuasan Masyarakat



Layanan publik di lingkup Ditjen PSDKP yang dilakukan meliputi layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang terdiri dari produk layanan ¹⁾ registrasi transmitter SPKP, ²⁾ pemantauan pergerakan kapal perikanan berupa informasi *plotting* dan *tracking* serta ³⁾ pemberian akses pemantauan kapal perikanan. Survei atas penggunaan layanan publik dilakukan sebagai salah satu upaya

perbaikan layanan yang diberikan oleh Ditjen PSDKP secara berkala dimana hasilnya digunakan sebagai bahan tidak lanjut perbaikan kualitas layanan publik kepada pengguna jasa. Survei dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan empat belas Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP setiap triwulan dan pengukuran indeks dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Sehingga meskipun pengukuran indeks pada akhir tahun anggaran tetapi proses perbaikan layanan publik berdasarkan hasil survei dapat dilakukan pada tahun berjalan. Realisasi indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik

Indikator Kinerja	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
IK 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Ditjen. PSDKP	80	88,92	111,15	80	90,88	113,6	80

Dari tabel diatas dapat dilihat indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,96 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada semester I, triwulan III dan semester II sedangkan di tahun 2021 survei kepuasan masyarakat dilaksanakan setiap triwulan.

Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan bervariasi di setiap UPP diantaranya dengan 1) menyampaikan informasi seputar layanan yang diberikan secara lisan kepada pengguna jasa 2) menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dengan jemput bola pengurusan SLO

(CEKATAN) sehingga pengguna jasa tidak harus datang ke kantor pengawasan untuk mengurus ijin 3) untuk pengguna jasa yang sudah melek teknologi juga dapat mengefisienkan waktu dengan melakukan pemantauan kapal melalui inovasi pengembangan aplikasi SALMON.

Indikator Kinerja 6

Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan money kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur efektivitas kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP. Dari target ditetapkan sebesar 70, indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP terealisasi sebesar 74,8 dengan capaian 106,86%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2021.

Tabel 3.5. capaian indikator kinerja indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP tahun 2021

Indikator Kinerja	2020			2021			2024
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target
IK 6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	-	-	-	70	74,8	106,86	-

Realisasi sebesar 74,8 diperoleh dari rerata perhitungan indeks efektifitas kebijakan atas SLO (dengan nilai 75,28) dan LVHPI (dengan nilai 74,32). Tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan Indikator Kinerja Baru.

Peraturan Menteri Peraturan Menteri KP Peraturan perundang-undangan yang dikaji merupakan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2021 tentang Program Penyusunan (Prosun) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP tahun 2021. Selain itu peraturan perundang-undangan yang dikaji sudah diimplementasikan untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. Sebanyak empat Peraturan Menteri KP terkait pengawasan SDKP tercantum dalam Prosun terkait Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; Standar Laik Operasi Kapal Perikanan; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; dan Pengawasan Kelautan. Keempat peraturan perundang-undangan tersebut merupakan amanat PP Nomor 27 tahun 2021, PP Nomor 21 tahun 2021 dan PP Nomor 5 tahun 2021. Dari keempat Peraturan Menteri KP tersebut dua diantaranya merupakan revisi dengan menyesuaikan amanah pada Peraturan Pemerintah terkait sebagai upaya perbaikan, serta sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP, yaitu Peraturan Menteri KP Nomor 10 tahun 2019 tentang Sistem

Pemantauan Kapal Perikanan dan Peraturan Menteri KP Nomor 45 tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang telah direvisi dengan terbitnya Peraturan Menteri KP Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Dari penilaian yang dilakukan, dapat diidentifikasi kebijakan yang diratifikasi belum selaras dengan tujuan jangka menengah instansi. Dalam perjalanan penyusunannya belum terdapat alternatif kebijakan, meskipun telah ditetapkan dan diimplementasikan namun belum dilakukan evaluasi perbandingan situasi sebelum dan setelah implementasi kebijakan. Namun demikian kebijakan yang ditetapkan tidak mengalami duplikasi dengan kebijakan lain serta output yang diharapkan telah sesuai dengan usaha yang diupayakan, serta telah dilakukan perencanaan atas monev kebijakan yang diimplementasikan. Saran yang dapat disampaikan untuk periode selanjutnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan.



Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tahun 2021 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak delapan dan telah tercapai sesuai target dengan capaian 100% sejak dibangun pada 2018. Adapun dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 telah diusulkan ¹⁾ Pangkalan PSDKP Bitung untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai total 76,79 dan telah dievaluasi kembali predikat tersebut setelah kurun waktu lebih dua tahun pada 2021 dengan hasil penilaian mencapai 80,92;

- b. Tahun 2019 telah diusulkan ²⁾ Pangkalan PSDKP Jakarta dan ³⁾ Pangkalan PSDKP Benoa untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 82,74 untuk Pangkalan PSDKP Jakarta dan 82,88 untuk Pangkalan PSDKP Benoa;
- c. Tahun 2020 telah diusulkan ⁴⁾ Pangkalan PSDKP Batam dan ⁵⁾ Pangkalan PSDKP Tual untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 87,27 untuk Pangkalan PSDKP Batam dan 87,29 untuk Pangkalan PSDKP Tual. Kedua unit kerja tersebut bersama dengan Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Benoa diusulkan untuk penilaian oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) Kemenpan RB pada 2021 namun Pangkalan PSDKP Tual belum bisa lolos penilaian dan belum mendapatkan predikat menuju WBK dari TPN;
- d. Tahun 2021 telah diusulkan ⁶⁾ Pangkalan PSDKP Lampulo, ⁷⁾ Stasiun PSDKP Belawan, dan ⁸⁾ Stasiun PSDKP Cilacap untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 80,88 untuk Pangkalan PSDKP Lampulo, 78,98 untuk Stasiun PSDKP Belawan dan 78,56 untuk Stasiun PSDKP Cilacap. Ketiga unit kerja tersebut akan diusulkan untuk penilaian oleh TPN pada 2022.

Sebagai upaya mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan pembangunan WBK khususnya pada komponen pengungkit area penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan yaitu meningkatkan komitmen bersama antara pemimpin unit kerja dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan zona integritas tidak hanya dari segi pemenuhan administratif tetapi betul betul diimplementasikan secara nyata.

Kegiatan utama yang mendorong pencapaian kinerja ini meliputi pembentukan tim pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang akan diusulkan wilayah bebas dari korupsi, pendampingan secara terus menerus sepanjang tahun dengan supervisi langsung Inspektorat Jenderal KKP, dan Penetapan tim pembina dilingkup satker pusat.

Indikator Kinerja 8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2021 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Realisasi capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 sebesar 77,91 dari target sebesar 73 sehingga tingkat capaian sebesar 106,72%. Jika disandingkan dengan tahun 2020

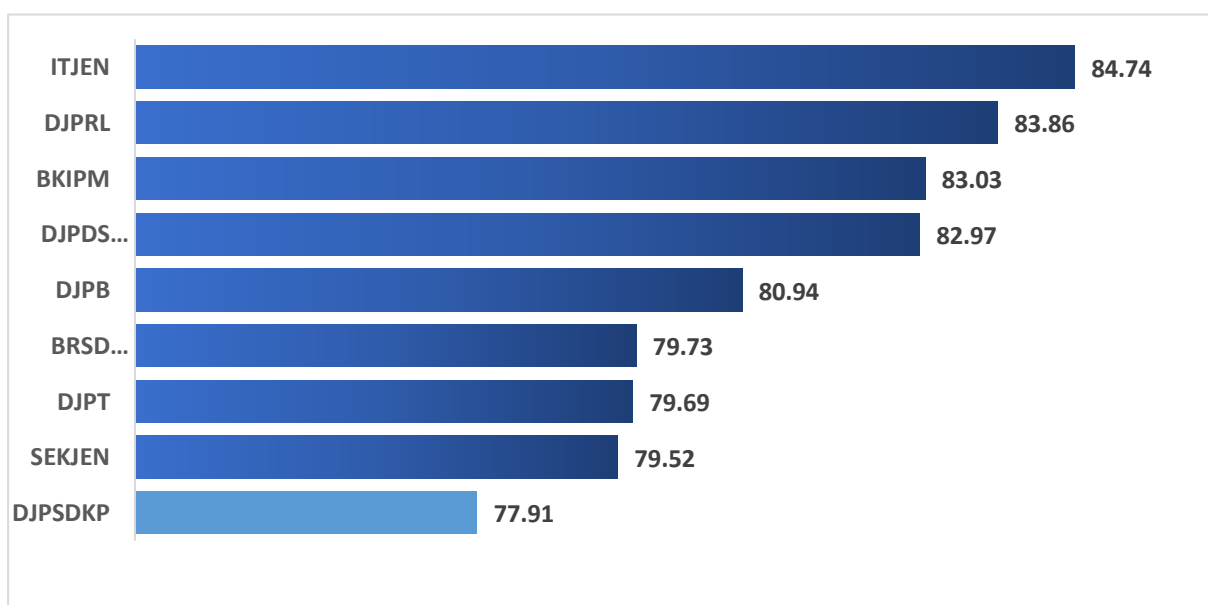
Kualifikasi	12,95 Nilai 25% Bobot	IP ASN DITJEN PSDKP 77,91
Kompetensi	35,01 Nilai 40% Bobot	
Kinerja	24,99 Nilai 30% Bobot	
Disiplin	4,96 Nilai 5% Bobot	

maka ada peningkatan nilai IP ASN sebesar 3,52. Peningkatan paling tinggi pada komponen kompetensi sebesar 35,01 dari nilai 2020 sebesar 31,75 yang dipengaruhi semakin banyaknya pegawai yang berpartisipasi pada kegiatan seminar/workshop/diklat. Capaian tahun 2021 juga dapat melampaui target IP ASN pada akhir renstra sebesar 76.

Tabel 3.6. Realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN
Lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021

Indikator Kinerja	2019	2020	2021		2024	
	R	R	T	R	%	Target
IK 8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP	67,76	74,39	73	77,91	106,72	76

Komponen kualifikasi ASN dengan bobot 25% realisasinya 12,95, selisih tersebut merupakan paling rendah dibandingkan komponen lainnya. Aspek kualifikasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar ASN yang diperbaharui pada basis data pegawai. Dari 1.243 orang pegawai lingkup Ditjen PSDKP, sejumlah 351 orang merupakan Awak Kapal Pengawas lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat maupun UPT dengan kualifikasi pendidikan didominasi setara SMA dan Diploma 3. Lebih lanjut, untuk pegawai dengan jabatan eselon, jabatan fungsional maka harus mengikuti Diklat PIM maupun diklat teknis/fungsional atau diklat sejenis lainnya minimal 20 JP untuk dapat memenuhi kualifikasi standar.



IP ASN Ditjen PSDKP berada di posisi terendah dan terdapat selisih sebesar 6,83 dengan unit kerja dengan IP ASN tertinggi lingkup KKP yaitu Inspektorat Jenderal KKP. Namun demikian, hal ini juga turut dipengaruhi oleh jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja dimana pada Inspektorat Jenderal KKP memiliki pegawai sebanyak 205 pegawai, atau hanya 16% dari total pegawai Ditjen PSDKP. Namun melihat unit kerja dengan jumlah pegawai banyak yaitu Ditjen Perikana Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan maka rentang IP ASN tidak terlalu jauh selisihnya.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas Awak Kapal dengan mengikuti seminar, pelatihan, maupun workshop serta mengikuti diklat yang dipersyaratkan pada jabatan tertentu. Lebih lanjut, kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan

seminar meskipun daring terbatas pada saat Kapal Pengawas sedang sandar atau perbaikan sehingga capaian Jam Pelatihan kurang optimal. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah memberikan kesempatan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan ataupun diklat dengan jumlah Jam Pelajaran yang lebih tinggi.

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- Menyelenggarakan bimbingan teknis antara lain: Gugus kendali mutu, Workshop SAKIP, Bimtek SAKIP, Bimtek penyusunan DUPAK Pengawas Perikanan.
- Melaksanakan Bimtek/pelatihan/diklat teknis antara lain diklat teknis pengawas perikanan, Diklat PPNS Perikanan, pelatihan pengawasan penangkapan ikan, Bimtek pengawasan budidaya ikan, pengawasan unit pengolahan ikan, Peningkatan Kemampuan Teknik Sampling Air,



Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 87,64 dengan kategori penilaian A, dan interpretasi “memuaskan”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku aparaturnya pengawas internal KKP melalui LHE nomor: 5091/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran. Perbandingan target dan capaian Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Capaian IK “Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP”

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024
	T	R	T	R	T
IK 9. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP	87%	88,86%	87,15%	87,64%	87,75%

Keterangan: T=Target; R=Realisasi

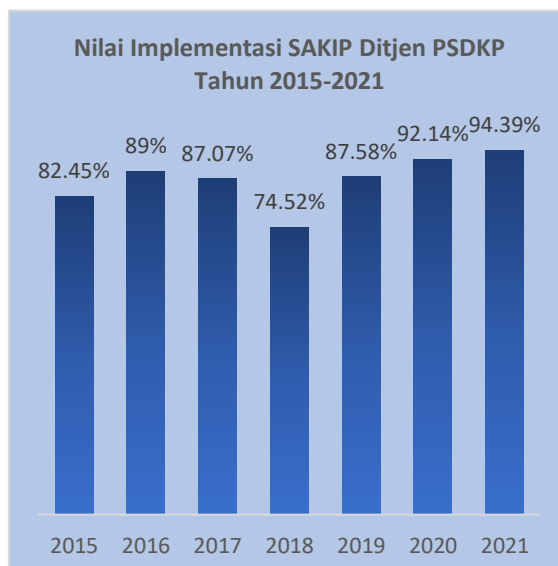
Capaian tahun 2021 menurun dari capaian tahun 2020 sebesar 1,22% yang disebabkan menurunnya nilai dua komponen yaitu pengukuran kinerja terkait dengan pengukuran indikator kinerja individu dan pelaporan kinerja terkait dengan pencantuman alokasi anggaran setiap sasaran program dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai upaya perbaikan kedepan diperlukan langkah-langkah khusus untuk mempertahankan komponen yang sudah mencapai target dan meningkatkan komponen yang rendah melalui peningkatan koordinasi tim kinerja Ditjen PSDKP.

Pencapaian kinerja Tahun 2021 diupayakan melalui penyusunan perencanaan kinerja yang lengkap dan baik antara lain rencana strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, rencana kerja 2021, perjanjian kinerja 2021, manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.

Selanjutnya sebagai upaya mengawal terjaminnya pelaksanaan kinerja yang sudah disusun dan ditargetkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian kinerja serta dapat mengidentifikasi secara dini kendala dan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dirumuskan rekomendasi perbaikan agar target dapat dicapai pada akhir periode. Kegiatan yang terkait termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan secara rutin.

Kedepan sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan nilai implementasi SAKIP Ditjen PSDKP maka diperlukan konsistensi penyelenggaraan SAKIP pada semua komponen diseluruh unit kerja hingga ke individu pegawai Ditjen PSDKP. Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja					Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021	Predikat Penilaian
	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Capaian		
KKP	27,31	21,26	13,31	8,78	14,06	84,72	A
Itjen	29,25	22,81	13,08	8,50	15,39	89,04	A
Ditjen PSDKP	29,50	21,88	12,73	8,50	15,03	87,64	A
BKIPM	27,22	23,13	13,08	7,88	16,10	87,40	A
Ditjen PRL	28,05	22,19	12,73	8,29	15,76	87,02	A
BRSDMKP	28,05	22,19	13,08	8,50	14,82	86,65	A
Ditjen PB	28,22	22,50	13,35	7,63	14,84	86,54	A
Ditjen PT	28,13	21,92	13,27	7,00	16,11	86,43	A
Ditjen PDS	27,58	22,81	13,08	8,50	14,38	86,36	A
Setjen	25,00	20,62	15,00	8,50	16,86	85,98	A

Indikator Kinerja 10

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan Publik



Ide/kreasi/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Terkait unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik, salah satu syarat inovasi yang diusulkan adalah sudah diimplementasikan selama minimal satu tahun. Pada lingkup Ditjen PSDKP inovasi pelayanan publik yang diusulkan melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik atau SINOVIK adalah pengembangan pelayanan sistem pemantauan kapal perikanan berupa SALMON yang merupakan singkatan dari Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP secara online.

SALMON mengintegrasikan seluruh aplikasi SPKP yang terdiri dari 1) fitur aktivasi, 2) lacak kapal, 3) monitor, 4) sebaran kapal dan 5) kontak. Pengguna SPKP dapat mengakses SALMON melalui laman spkp.kkp.go.id dengan menerapkan sistem layanan satu atap atau *one stop service* secara online dengan waktu proses 40 menit dan produk pelayanann yang diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang dikirim melalui surel. Aplikasi SALMON dapat diunduh dari playstore dengan nama SALMON *Track Mobile*. Evaluasi secara internal oleh UPP dan eksternal oleh Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui SALMON.

Tabel 3.8. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik tahun 2021

Indikator Kinerja	2020		2021		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target
IK. 10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	2	1	1	100%	1

Ket=Target, R=Realisasi

Pada tahun 2020 inovasi yang diusulkan ada dua sedangkan tahun 2021 hanya ada 1 tetapi kualitas inovasinya jauh lebih baik lagi. Kedepan perlu selalu meningkatkan kualitas inovasi yang sudah ada melalui monitoring dan evaluasi implementasinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan inovasi tahun 2021 diantaranya:

- 1) Mengembangkan aplikasi SALMON tidak hanya diakses dari laman spkp.kkp.go.id tetapi juga dapat diakses dari aplikasi mobile SALMON Track Mobile;
- 2) Evaluasi internal oleh UPP Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan eksternal oleh LAN

Indikator Kinerja 11 Batas Tertinggi persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2020 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, tidak terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2020, dibuktikan pada Inmen Nomor R.288/MEN.KP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 masih terdapat temuan keuangan namun langsung ditindaklanjuti, sedangkan tahun 2021 tidak ada temuan keuangan sama sekali. Perbandingan sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP

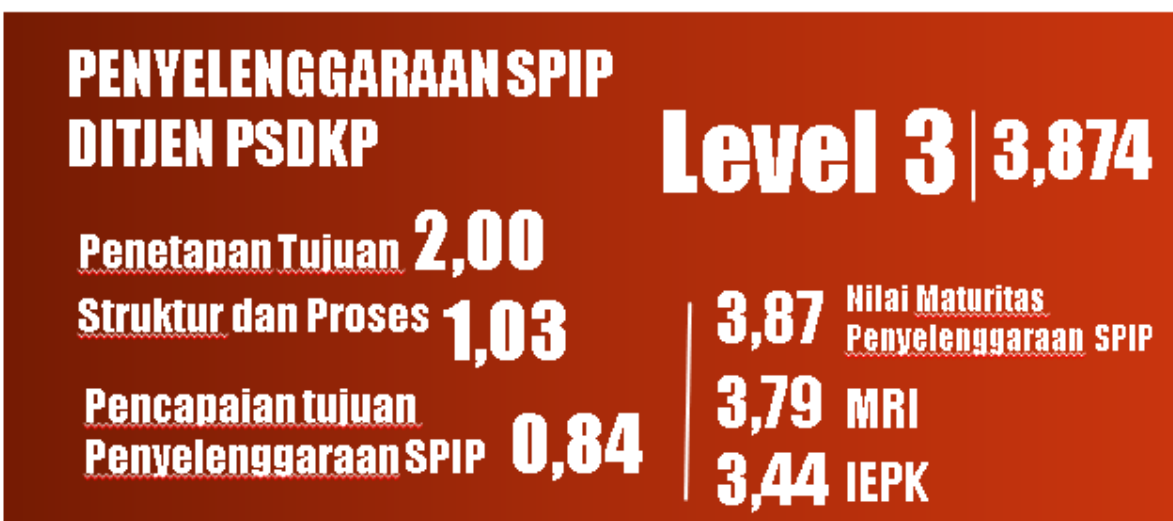
Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021		2024	
	R	R	R	T	R	%	Target
IK. 11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP	24	0,01	0,01	<1	0	100%	<1

Ket=Target, R=Realisasi

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP triwulan I, semester I, triwulan III dan tahun 2021 baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi.

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	371.774.244.798	379.182.525,00	≤1	0,10	197,87
2	Itjen	65.520.750.972	0,00	≤1	0,00	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	492.002.433.664	96.615.701,00	≤1	0,02	198,04
4	Ditjen Perikanan Budidaya	816.747.196.652	1.592.937.168,80	≤1	0,20	180,50
5	Ditjen PSDKP	678.507.729.219	0,00	≤1	0,00	200,00
6	Ditjen PDSPKP	205.412.538.137	116.209.812,83	≤1	0,06	194,34
7	Ditjen PRL	393.614.623.041	741.810.466,00	≤1	0,19	181,15
8	BRSDMKP	1.320.746.519.611	267.065.763,00	≤1	0,02	197,98
9	BKIPM	465.537.557.721	45.904.000,00	≤1	0,01	199,01
TOTAL		4.809.863.593.815	3.239.725.436,63	≤1	0,07	193,26

Indikator Kinerja 12
Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP



Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,874 sebagaimana tersaji pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021		2024
	R	R	R	R	T	R	T
IK. 12. Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP	2	3	3	4	3	3	3

Ket=Target, R=Realisasi

Nilai maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP tahun 2020 sebesar 4,39 sedangkan di tahun 2021 sebesar 3,874 maka terjadi penurunan nilai maturitas SPIP sebesar 0,5. Namun demikian, level maturitas SPIP tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dapat disandingkan karena metode pengukurannya berbeda dimana tahun 2020 merupakan penilaian pada unit kerja Ditjen PSDKP secara langsung sedangkan pada tahun 2021 merupakan adaptasi nilai maturitas SPIP lingkup KKP sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3860/SJ.2/KU.130/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan level maturitas SPIP diantaranya dengan ¹⁾ meningkatkan kualitas indikator sasaran program menjadi seluruhnya berorientasi hasil (outcome) ²⁾ meningkatkan kualitas pengendalian resiko atas seluruh kegiatan operasional unit kerja dan resiko strategis unit eselon I ³⁾ meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

Indikator Kinerja 13 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Tabel 3.11.

Hasil penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021

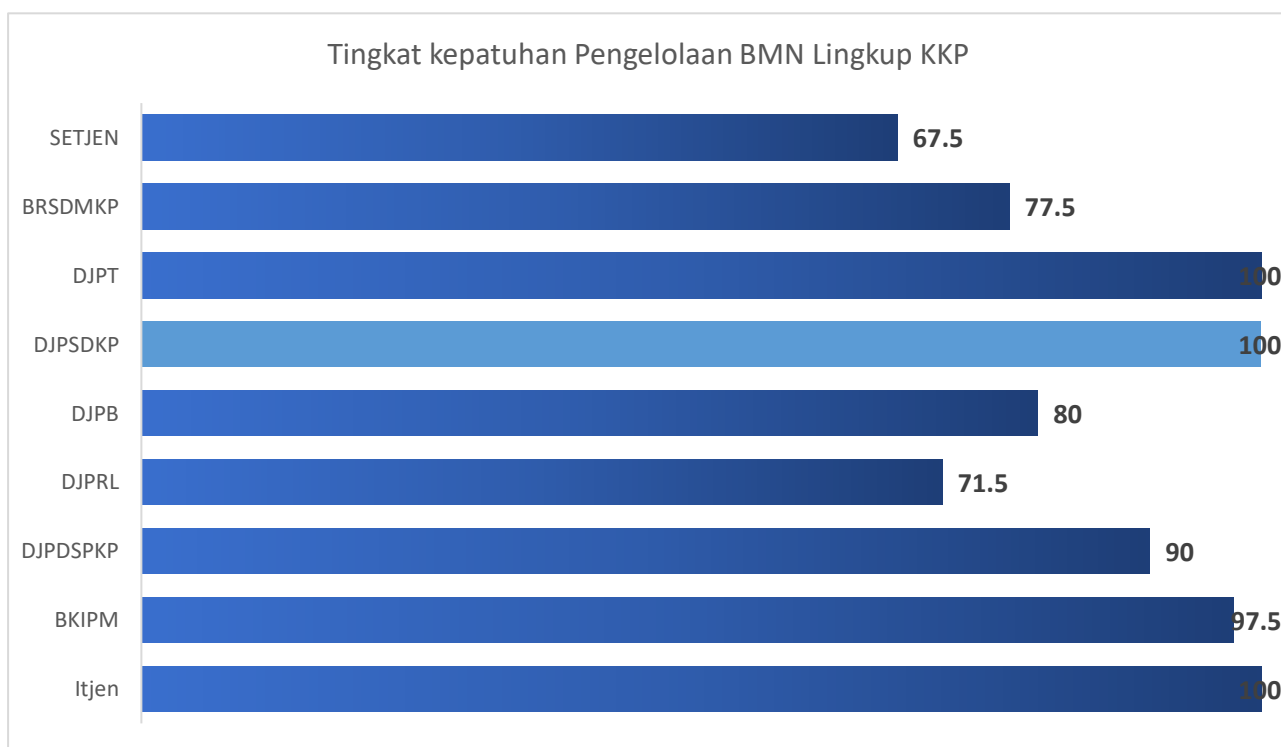
Komponen Kepatuhan BMN	Bobot	Nilai
Pemanfaatan RK BMN tahun 2020	12,5	12,5
Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST s.d triwulan I tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	25	25
Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode tahun 2017-2018 yang diselesaikan tahun 2020	25	25
Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian	25	25
Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	12,5	12,5
	Σ	100

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN tahun 2020, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan I tahun 2021 ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019, ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2021 tersaji pada tabel 3.12.

Tabel 3.12. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021

Indikator Kinerja	2020		2021		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target
IK13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021	-	-	72,5	100	120%	-

Dengan target 72,5 realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 sebesar 100 dengan tingkat capaian sebesar 120%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Lebih lanjut, Ditjen PSDKP dengan nilai maksimal 100% untuk pengelolaan BMN bersama dua unit kerja lainnya yaitu Inspektorat Jenderal dan Ditjen Perikanan Tangkap untuk pengelolaan BMN memberikan langkah awal yang baik untuk pengelolaan BMN Ditjen PSDKP bahwa implementasi pengelolaan BMN yang sudah tertib supaya dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.



Upaya yang dilakukan untuk mencapai realisasi tersebut diantaranya:

- 1) Mengikuti sosialisasi indikator kinerja tingkat kepatuhan BMN yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal KKP untuk lingkup KKP pada triwulan III 2021
- 2) Sosialisasi pengukuran indikator kinerja dimaksud lingkup Ditjen PSDKP dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat I dan Inspektorat II KKP serta diikuti oleh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP
- 3) Pendampingan pengukuran indikator kinerja dimaksud.
- 4) Finalisasi capaian indikator kinerja dimaksud.

Berbagai upaya tersebut secara bertahap turut berperan aktif untuk ketertiban pengelolaan BMN masing-masing unit kerja. Hal yang harus ditingkatkan adalah *self awareness* bagi pemimpin dan pengelola BMN masing-masing unit kerja bahwa pengelolaan BMN pada saat ditetapkan merupakan salah satu indikator kinerja yang diukur tingkat kepatuhan pengelolaannya dan menjadi bagian dari pengelolaan kinerja organisasi.

Indikator Kinerja 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Tabel 3.13.
Penilaian kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021

Komponen Kepatuhan PBJ	Bobot	Nilai
Ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP	10	8,35
Perencanaan dan persiapan pengadaan	15	12,1
Presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	10	10
Kesesuaian tahap pelaksanaan	45	34,65
Laporan penyelenggaraan PBJ	5	3,75
persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP triwulan I s.d triwulan III tahun 2021	15	15
Σ		83,85

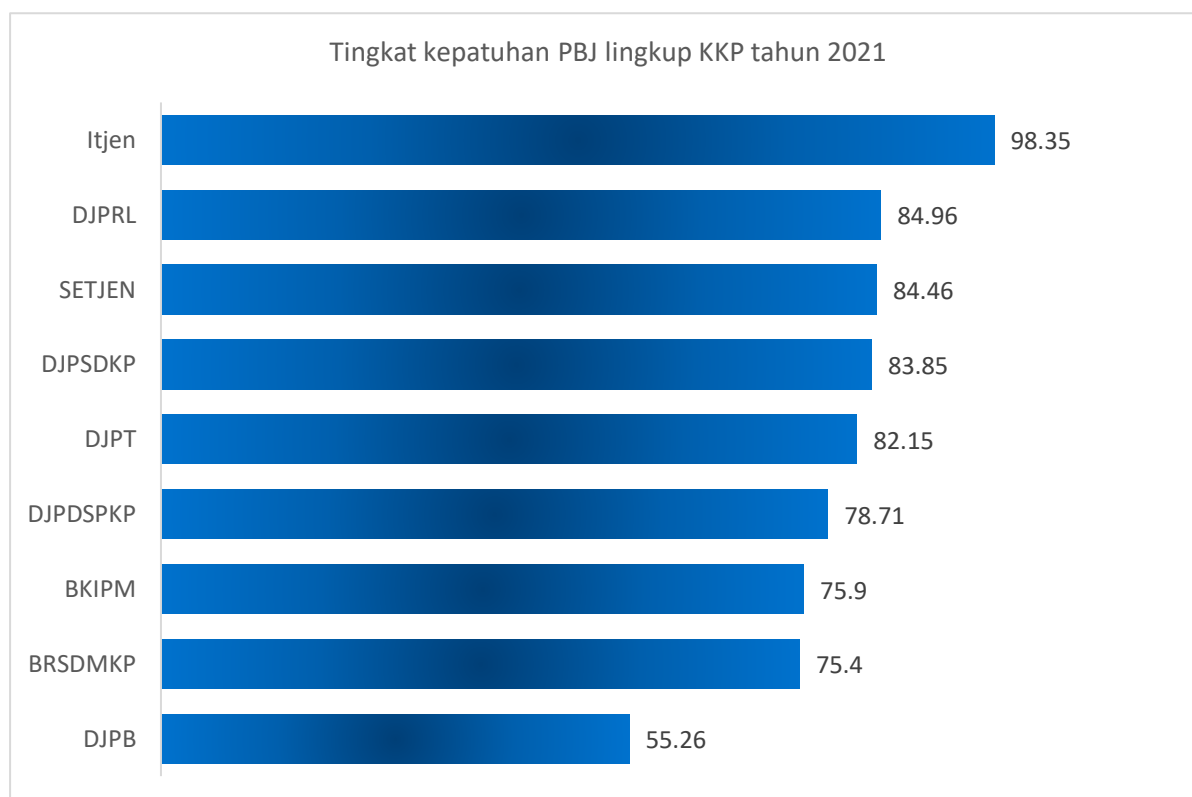
Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP triwulan I s.d triwulan III tahun 2021. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Dari hasil penilaian kepatuhan PBJ Ditjen PSDKP tahun 2021, maka selisih hasil dengan nilai maksimal paling tinggi ada pada kesesuaian tahap pelaksanaan kemudian pada tahap perencanaan.

Tabel 3.14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021

Indikator Kinerja	2020		2021		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target
IK. 14. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021	-	-	72,5	83,85	115,66%	-

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 merupakan indikator baru sehingga tidak bisa disandingkan dengan indikator sejenis periode

pengelolaan kinerja sebelumnya. Dengan realisasi 83,85 dari target 72,5 maka tingkat capaiannya sebesar 115,66%. Dengan nilai kepatuhan tersebut, Ditjen PSDKP menempati posisi ke-empat lingkup KKP.



Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pengadaan barang/jasa diantaranya ¹⁾ penandatanganan kontrak paket pengadaan barang/jasa hingga triwulan III tahun 2021 ²⁾ belum semua pengadaan diumumkan dalam SIRUP ³⁾ terdapat beberapa penyelesaian pengadaan kontrak yang terlambat ⁴⁾ meskipun pelaporan progres barang/jasa dilakukan setiap bulan namun berdasarkan kesepakatan lingkup KKP untuk pelaporan progres pengadaan barang/jasa menggunakan laporan dari UKPBJ yang diterbitkan setiap triwulan. Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan.

Indikator Kinerja 15
Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen
Pengetahuan Terstandar

MANAJEMEN PENGETAHUAN
TERSTANDAR DITJEN
PSDKP

99,21%

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
99,06%	99,06%	99,35%	99,35%
20% Dokumen	20% Dokumen	20% Dokumen	20% Dokumen
10% Keikutsertaan	10% Keikutsertaan	10% Keikutsertaan	10% Keikutsertaan
69,06% Keaktifan	69,06% Keaktifan	69,35% Keaktifan	69,35% Keaktifan

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 99,21% yang diperoleh dari rata-rata capaian triwulan I sampai dengan IV. Penilaian terdiri dari 3 komponen yaitu pemenuhan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 3.15.

Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar”

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024
	T	R	T	R	T
IK15. Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	82%	98%	84%	99,21%	90%
%Capaian	119,51%		118,11%		110%

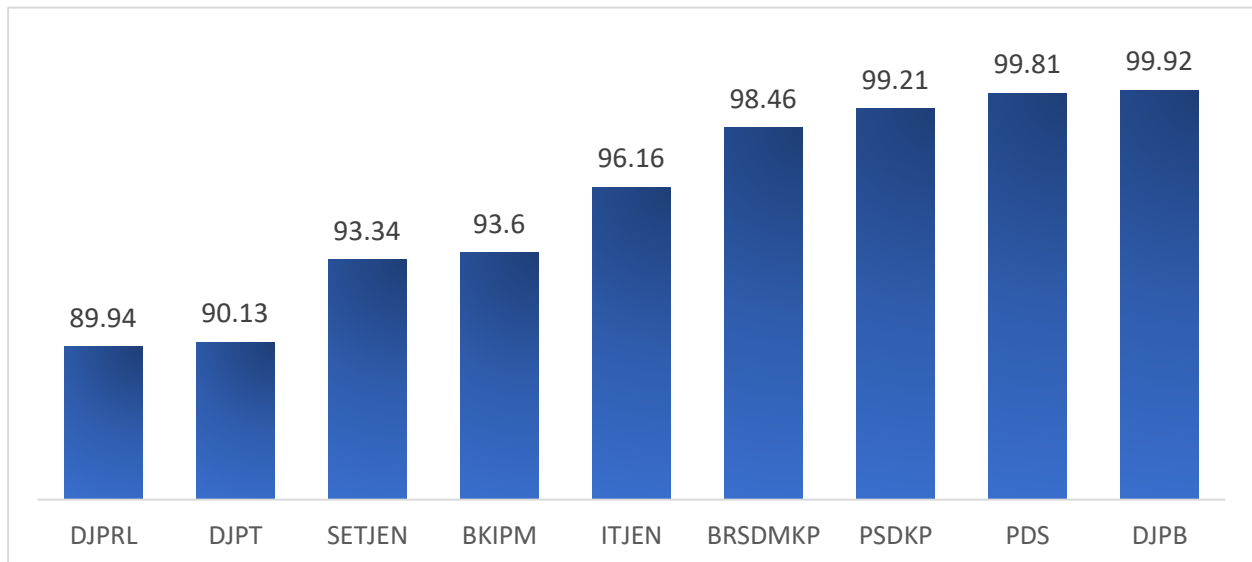
Ket: T=Target, R=Realisasi

Tingginya capaian kinerja pada Tahun 2021, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen PSDKP untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi dan

monitoring secara terus menerus untuk mempertahankan capaian kinerja, serta untuk meningkatkan lebih optimal lagi.



Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



Indikator Kinerja 16
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PENGAWASAN ITJEN**

89,16%

PUSAT

13,72%

97 REKOMENDASI

62 TINDAKLANJUT

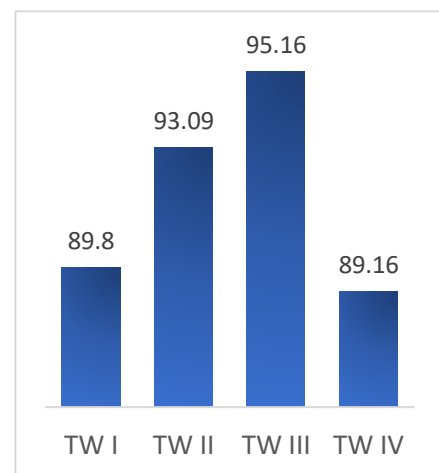
UPT PSDKP

75,44%

355 REKOMENDASI

341 TINDAKLANJUT

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2020 s/d 30 Juni 2021. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Hingga 31 Desember 2021 dari 452 rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas sebanyak 403 rekomendasi dan menyisakan 34 rekomendasi dalam proses dan 15 lainnya pending. Beberapa rekomendasi yang sedang proses dan pending diantaranya ¹⁾ evaluasi operasi kapal pengawas di Stasiun PSDKP Tarakan ²⁾ hasil audit kepegawaian lingkup Ditjen PSDKP ³⁾ Reviu atas dokumen persiapan tiga pengadaan barang dan jasa pada Pangkalan PSDKP Bitung ⁴⁾ Evaluasi operasi kapal pengawas dan operasi pesawat patroli ⁵⁾ Evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PSDKP tahun 2021 ⁶⁾ hasil audit kepegawaian Pangkalan PSDKP Tual ⁷⁾ hasil audit kinerja Pangkalan PSDKP Bitung TA 2020 s.d 31 Mei 2021 ⁸⁾ evaluasi implementasi SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2021 ⁹⁾ evaluasi TPKP serta penanganan barang bukti Ditjen PSDKP ¹⁰⁾ evaluasi manajemen resiko Ditjen PSDKP TA 2021 ¹¹⁾ evaluasi benturan kepentingan Ditjen PSDKP tahun 2021. Terdapat 49 rekomendasi dalam proses dan pending yang harus segera dituntaskan tindak lanjutnya.



Realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara triwulanan pada tahun 2021 lingkup Ditjen PSDKP fluktuatif dan mencapai upaya optimal pada triwulan III tahun 2021 dimana realisasi tertinggi sebesar 95,16% menurun sampai 6% pada triwulan IV tahun 2021..

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode tahun 2021. Capaian pada periode ini disumbang paling banyak oleh lingkup UPT sebanyak 96,73% selain karena rekomendasi yang diterbitkan hampir ada di setiap UPT kecuali Pangkalan PSDKP Benoa, juga karena respon cepat UPT untuk dapat segera menindak lanjuti rekomendasi yang diterbitkan. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan SDKP yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2021 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah 1) koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan 2) koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

Capaian Tahun 2021 meningkat sebesar 15,12% dari capaian tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16. Perbandingan Target dan Capaian IK 16

Indikator Kinerja utama	2019	2020	2021		2024
	R	R	T	R	T
IK 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	78,03%	74,04%	65%	89,16%	80%

Ket=Target, R=Realisasi

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

- 1) Selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen. PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai/tuntas.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan hingga tuntas;

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja diantaranya ¹⁾ melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ²⁾ selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait ³⁾ monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	118	118	100%	0	0
2	BRSDMKP	550	488	88,73%	62	11,27%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	476	407	85,50%	69	14,50%
4	Ditjen PSDKP	452	403	89,16%	49	10,84%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	483	391	80,95%	92	19,05%
6	Ditjen PRL	367	357	97,28%	10	2,72%
7	Ditjen PDSPKP	204	197	96,57%	7	3,43%
8	BKIPM	319	301	94,36%	18	5,64%
9	Itjen	68	66	97,06%	2	2,94%
TOTAL		3037	2728	89,83%	309	10,17%

Indikator Kinerja 17

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

**NILAI INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
IIKPAI**

92,31%

**Kesesuaian
Perencanaan**

94,61

5 Revisi DIPA

4,19 Deviasi Hal. III DIPA

5 Pagu Minus

Kepatuhan

91,95

8,80 Data Kontrak
6,88 Pengelolaan UP & TUP

4,94 Bendahara LPJ

4,75 Dispensasi SPM

Efektivitas

93,74

13,05 Penyerapan

9,72 Penyelesaian Tagihan

15,50 Capaian Output

4,98 Retur SP2D

Efisiensi

95

5 Rencana Kas

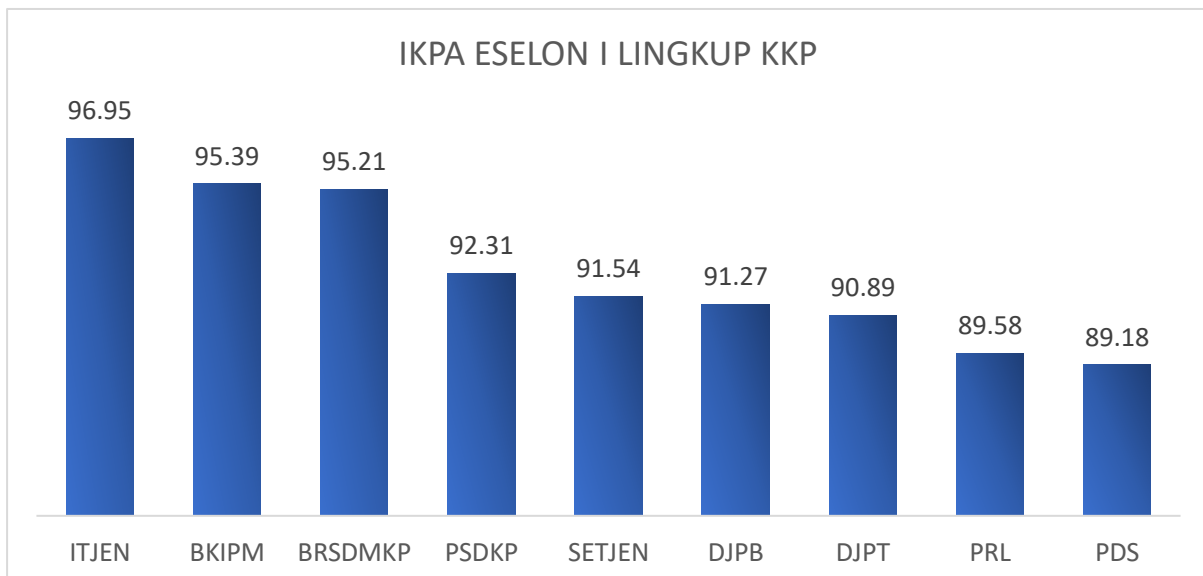
4,50 Kesalahan SPM

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 92,31 dari target sebesar 89 menurun sebesar 2,17 dari capaian Tahun 2020 yang disebabkan adanya deviasi hal. III DIPA.

Indikator Kinerja utama	2019	2020	2021		Tahun 2024
	R	R	T	R	T
IK 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,86	94,78	89	92,31	80

Ket=Target, R=Realisasi

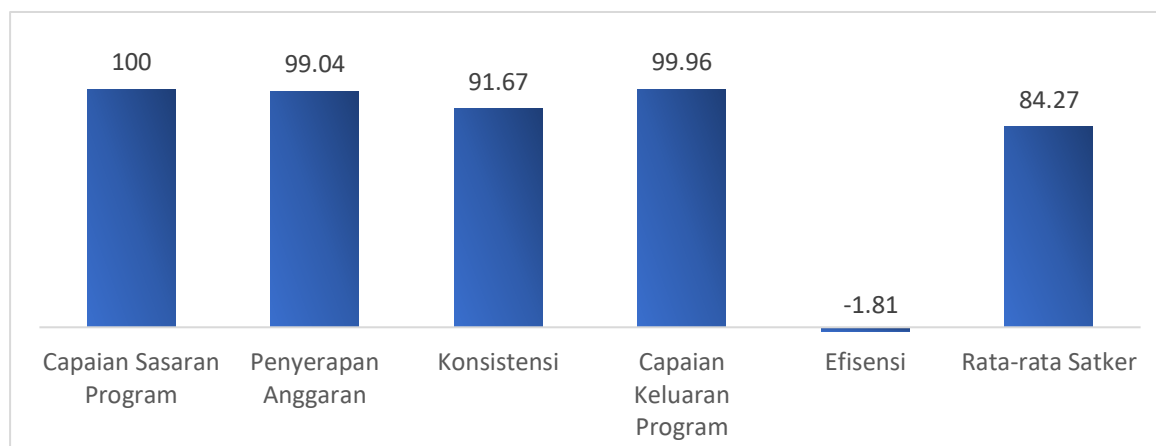
Indikator yang tercapai nilai maksimal diantaranya ¹⁾ Revisi DIPA ²⁾ Ketiadaan Pagu Minus dan ³⁾ Rencana Kas. Sedangkan indikator yang masih harus ditingkatkan diantaranya ¹⁾ Deviasi Hal III DIPA ²⁾ Data Kontrak ³⁾ Pengelolaan UP dan TUP ⁴⁾ Dispensasi SPM dan ⁵⁾ Penyerapan anggaran. Beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya 1) data RPD (Rencana Penarikan Dana) masing-masing unit kerja belum diperbaharui ketika terjadi perubahan/revisi anggaran 2) kontrak ada yang terlambat dalam penyelesaiannya 3) UP dan TUP sempat mengalami keterlambatan karena beberapa kali penyelesaian SPJ terkendala dan kuantitas Dispensasi SPM. Langkah-langkah perbaikan ke depan perlu dilakukan dengan mempertahankan pengelolaan keuangan yang sudah baik pada tahun 2021 dan mengoptimalkan pencapaian pada aspek yang lainnya melalui koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi. Pencapaian kinerja diupayakan melalui kegiatan utama antara lain pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan jasa.



Indikator Kinerja 18 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PSDKP

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu

(SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 89,27 dari target sebesar 86 atau 120%, dengan rincian per komponen sebagai berikut:



1. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program sebesar 100%;
2. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker sebesar 99,04%.
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan sebesar 91,67%;
4. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran sebesar 99,96%;
5. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran sebesar 1,81%;
6. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, perlu ditingkatkan kinerja satker supaya nilai kinerja Ditjen PSDKP lebih baik lagi. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 91,07, terjadi penurunan yang disebabkan oleh beberapa sebagai berikut:

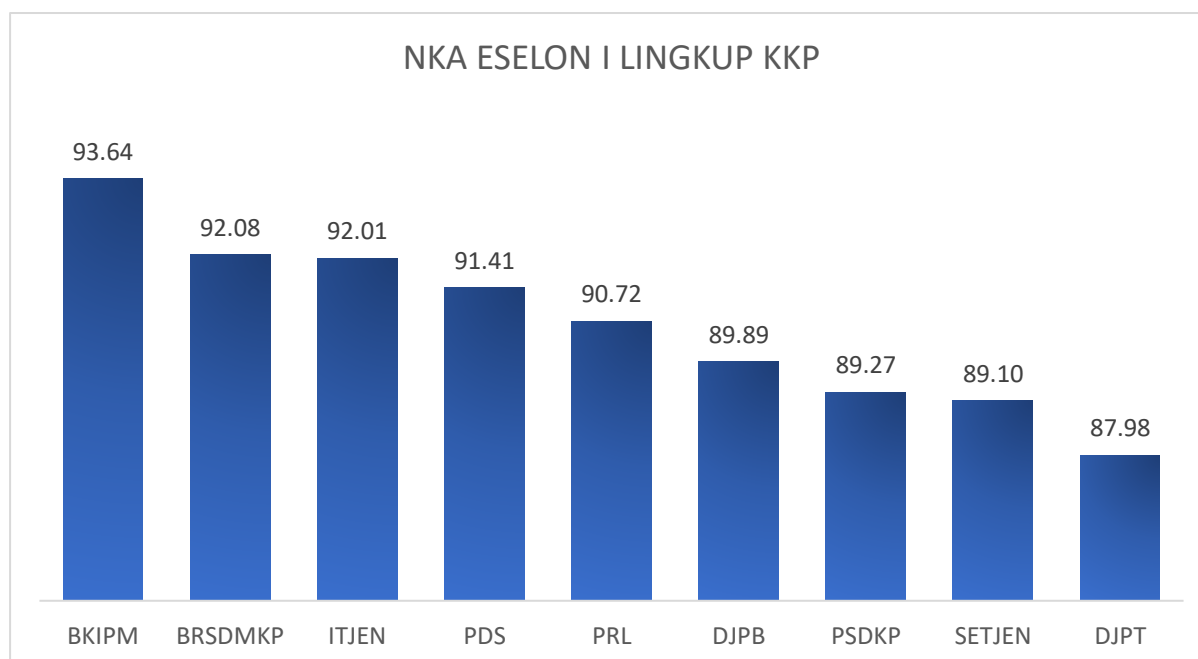
1. Komponen penghitungan tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020 yaitu penambahan nilai rata-rata kinerja satker lingkup Ditjen PSDKP
2. Menurunnya capaian keluaran program yang disebabkan adanya keluaran program yang tidak tercapai sesuai target.

Perbandingan realisasi dengan tahun 2020 dan target Renstra tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024
	T	R	T	R	T
IK. 18. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP	85	91,07	86	89,27	89
%Capaian	120%		120%		100,30%

Ket=Target, R=Realisasi

Perbandingan capaian Nilai kinerja Anggaran dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



EFISIENSI

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan sebesar -1,81. Nilai efisiensi minus dipengaruhi oleh adanya realisasi anomali (>200%) pada beberapa satker yang mengakibatkan realisasi output melebihi target yang ditetapkan. Nilai efisiensi berdasarkan sasaran program sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
Tatakelola SDKP bertanggung jawab	1	32.158.564.000	31.798.487.760	38,2%
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	2	452.157.695.000	448.069.541.673	25,5%
Tata kelola pemerintahan yang baik	15	255,157,413,000	252,488,199,154	5,9%

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP:

1. Pengembangan *e-office*. Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamankan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari pakem yang sudah ada menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2021 sudah diimplementasikan berupa *e-report* yang bertujuan untuk memperbaharui mekanisme penyampaian dan format laporannya serta memangkas waktu bekerja dalam penyusunan laporan mingguan. Selanjutnya dikembangkan *e-office* tahap 2 berupa pengembangan *e-cuti* dan *e-spj* yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan cuti dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi . Pada akhir triwulan I tahun 2021 terdapat kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas KKP yaitu peningkatan PNBK dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan, peningkatan produksi udang, lobster dan rumput laut untuk ekspor dan pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Sehingga dilaksanakan efisiensi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas KKP tersebut termasuk pengurangan belanja bahan dan pencetakan serta konsumsi. Dengan adanya *platform e-layar* dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Ditjen PSDKP. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui *e-layar* dan untuk laporan kinerja khususnya level I dipublikasikan melalui laman resmi Ditjen PSDKP. Kedepannya untuk laporan yang dipublikasikan melalui laman resmi Ditjen PSDKP akan lebih beragam termasuk laporan kinerja dan laporan kegiatan level II lingkup Ditjen PSDKP.

3. Optimalisasi penggunaan media daring untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Ditjen PSDKP. Sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP mencakup satker pusat dan UPT PSDKP dilakukan pertemuan rapat secara berkala secara daring. Selanjutnya, untuk memantau perkembangan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP dilakukan supervisi/pendampingan/pembinaan secara daring, termasuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Melalui mekanisme ini alokasi anggaran pertemuan di luar kota dan perjalanan dinas dapat dihemat dan dialokasikan untuk output lain yang lebih diprioritaskan.

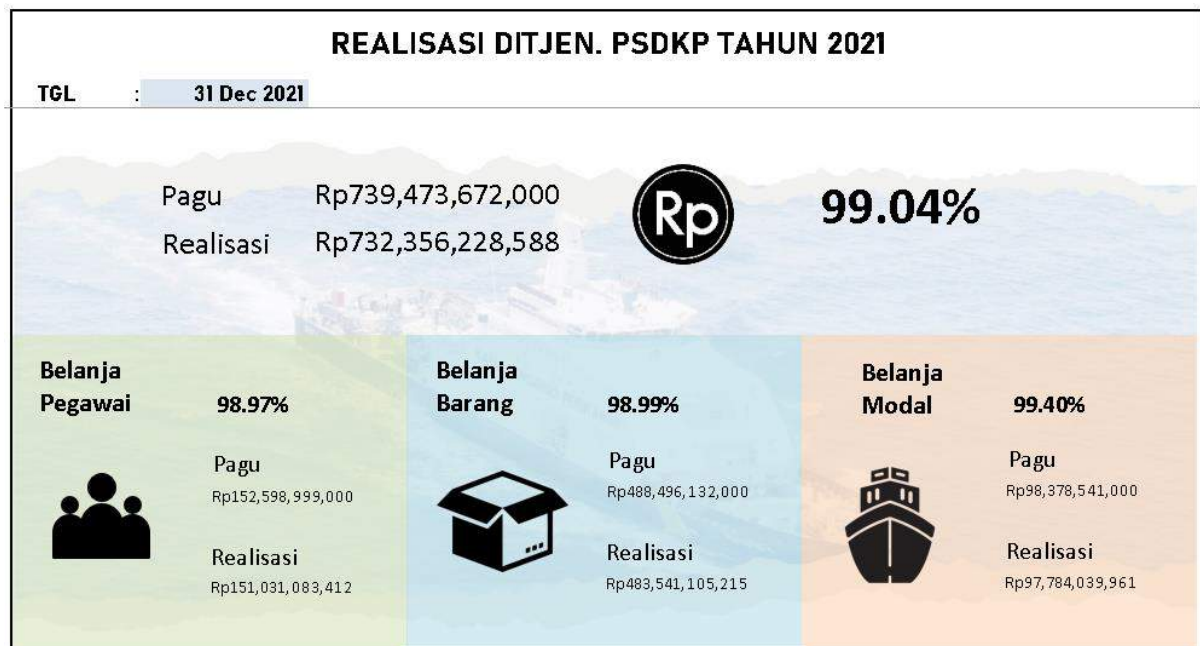
PENGHARGAAN



Penghargaan atas kinerja pemberantasan illegal fishing. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas upaya KKP yang selama pandemi covid-19 terus berupaya mengamankan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah-wilayah rawan illegal fishing. Penghargaan lain yang diperoleh adalah peringkat kedua Implementasi SAKIP lingkup KKP dan UPT PSDKP yang meraih predikat wilayah bebas dari Korupsi.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

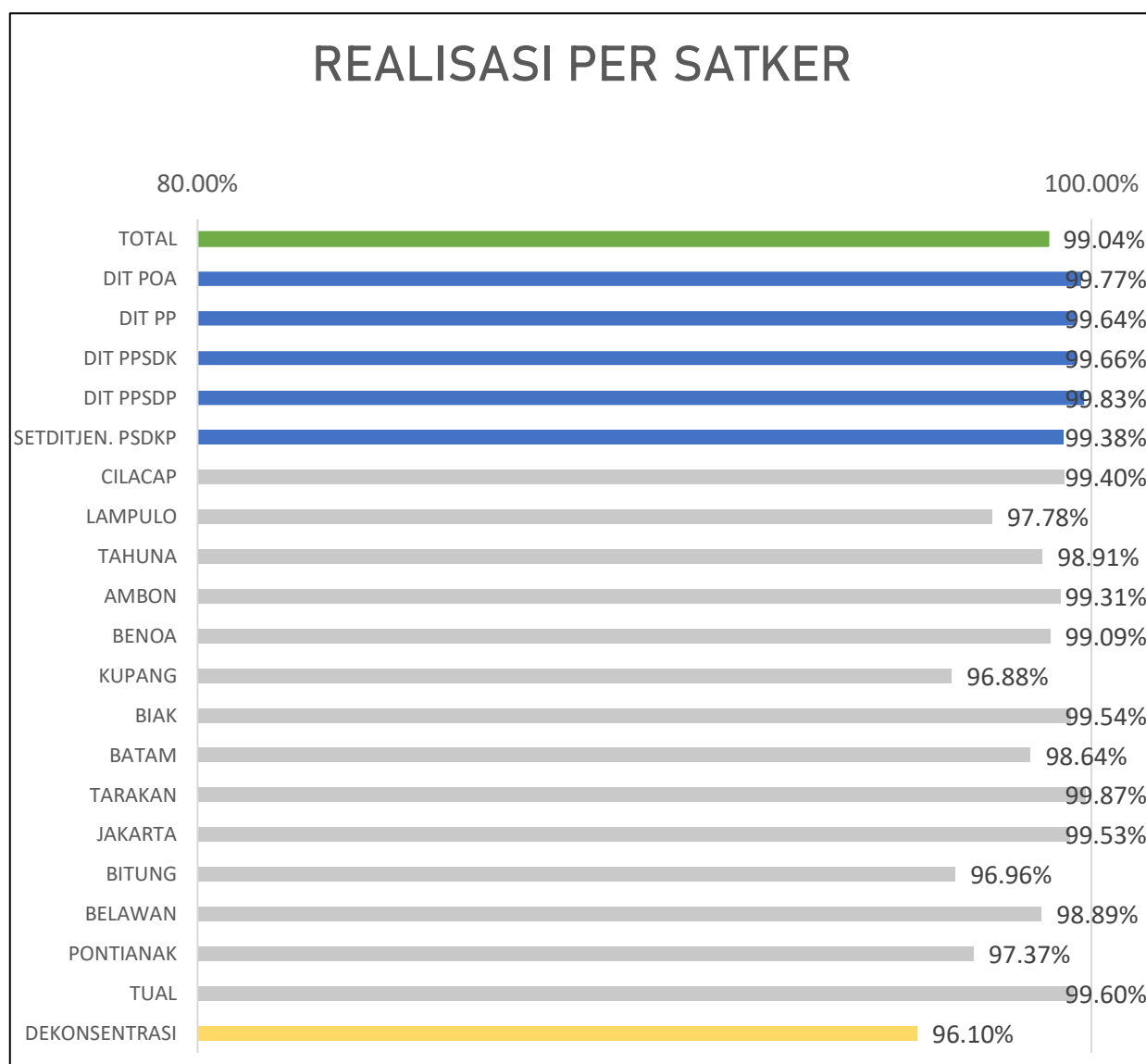


Alokasi anggaran pasca refocusing Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 739.473.672.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.732.356.228.588; atau 99,04%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Program 2021

SASARAN PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KRO/RO	ANGGARAN	REALISASI	%
Tatakelola SDKP bertanggung jawab	1	13	32.158.564.000	31.798.487.760	98,88
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	2	10	452.157.695.000	448.069.541.673	99,10
Tata kelola pemerintahan yang baik	15	16	255,157,413,000	252,488,199,154	98.95
JUMLAH	18	39	739,473,672,000	732,356,228,588	99.04

Rincian Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Ditjen. PSDKP tahun 2021, sebagai berikut:



Berdasarkan kegiatan utama yang dilaksanakan, pagu dan realisasi sampai dengan 2021, sebagai berikut:

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pemantauan dan Operasi Armada	437,919,419,000	434,768,280,034	99.28
Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	19,203,935,000	18,218,006,054	94.87
Pengawasan Pengelolaan SDK	13,649,330,000	13,532,799,573	99.15
Pengawasan Pengelolaan SDP	16,408,947,000	16,187,873,884	98.65
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	252,292,041,000	249,649,269,043	98.95
JUMLAH	739,473,672,000	732,356,228,588	99.04



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Ditjen PSDKP pada tahun 2021 menghadapi tantangan yang besar dengan munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlunya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Disisi lain pengelolaan kelautan dan perikanan termasuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus tetap berjalan. Namun dengan kondisi seperti itu, seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan mampu dicapai sesuai target, secara total capaian kinerja tahun 2021 sebesar 105,14%. Realisasi anggaran dalam rangka mewujudkan 3 sasaran program dan 18 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah tercapai 99,04%.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

- 1.** Mendorong kinerja berbasis inovasi sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja Ditjen PSDKP dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan baik berbasis digital maupun non-digital, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP.
- 2.** Penguatan Sistem Manajemen Kinerja perlu terus dilakukan dengan memastikan *interoperabilitas* data dan layanan dari sistem informasi yang digunakan di lingkungan Ditjen PSDKP.
- 3.** Penajaman indikator kinerja yang akan dijadikan acuan penyusunan sasaran merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja;
- 4.** Mendorong keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala disetiap satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP, sehingga tujuan Ditjen PSDKP terkomunikasikan dan dipahami serta dapat dilaksanakan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Jakarta, ³¹ Agustus 2021
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	1. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
2.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,5
		3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	31
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	80
		6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70
		7. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	8
		8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	73
		9. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,15
		10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	<1
		12. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	72,5

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	72,5
		15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	84
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	65
		17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	89
		18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	437.753.507.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	19.390.017.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	13.677.415.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	16.445.130.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	252.207.603.000
TOTAL		739.473.672.000

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Monitoring Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP TA. 2021 Per IKU Level 1 (OMSPAN)

TGL DA 31 December 2021

No	KODE	KRO	RO	Total Pagu	Realisasi Anggaran	
					Rp	%
		Kumulatif Ditjen PSDKP		739,473,672,000	732,356,228,588	99.04%
	IKU1	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		32,158,564,000	31,798,487,760	98.88%
	2350.BID	Pengawasan dan Pengendalian kelompok Masyarakat	Supervisi	712,510,000	707,702,527	99.33%
	2350.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pembinaan	1,900,500,000	1,879,951,780	98.92%
	2351.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pembinaan dan pemulangan nelayan	649,800,000	648,298,339	99.77%
	2352.AEA	Koordinasi	Koordinasi	1,675,072,000	1,670,609,612	99.73%
	2352.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penyadartahuan	2,182,800,000	2,179,206,222	99.84%
	2352.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan pelaku usaha kelautan	2,350,169,000	2,303,657,104	98.02%
	2352.BKB	Pemantauan produk	Supervisi	3,588,842,000	3,573,136,432	99.56%
	2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan pelaku usaha kelautan (PN)	3,498,064,000	3,454,878,703	98.77%
	2353.AEA	Koordinasi	Koordinasi	877,860,000	875,676,354	99.75%
	2353.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penyadartahuan	1,162,030,000	1,159,506,666	99.78%
	2353.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan pelaku usaha perikanan	2,867,839,000	2,800,730,085	97.66%
	2353.BKB	Pemantauan produk	Supervisi dan bimtek	3,619,069,000	3,614,404,381	99.87%
	2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan pelaku usaha perikanan	7,074,009,000	6,930,729,555	97.97%
	IKU2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)		433,659,031,000	430,555,015,058	99.28%
	2350.BKB	Pemantauan produk	Supervisi Ops Armada, Supervisi	1,413,120,000	1,380,878,978	97.72%
	2350.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pengadaan Sarana	670,333,000	615,756,825	91.86%
	2350.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pengadaan Prasana	1,185,352,000	1,178,551,586	99.43%
	2350.QHD	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi KP, AS, SB	275,803,556,000	274,009,813,825	99.35%
	2350.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pengadaan KP, SB	28,163,606,000	28,111,721,087	99.82%
	2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Pengadaan Prasana	17,251,037,000	17,128,525,444	99.29%
	2350.RCG	OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perawatan Armada, Operasional Sistem	109,172,027,000	108,129,767,313	99.05%
	IKU3	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)		18,498,664,000	17,514,526,615	94.68%
	2351.AEA	Koordinasi	Satgas, Data TPKP,	7,436,184,000	7,380,318,647	99.25%
	2351.BCE	Penanganan Perkara	Penanganan Kasus, Barbuk, Awak Kapal	9,317,235,000	8,395,449,889	90.11%
	2351.BKB	Pemantauan produk	Supervisi	1,745,245,000	1,738,758,079	99.63%
	IKU4	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)		394,976,750	393,105,670	99.53%
	2355.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Ortala	188,906,750	187,623,115	99.32%
	2355.AEC	Kerja sama	Kerjasama	206,070,000	205,482,555	99.71%
	IKU5	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Ditjen PSDKP		1,646,740,000	1,624,972,669	98.68%
	2350.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	SKAT	1,646,740,000	1,624,972,669	98.68%
	IKU6	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP		1,653,860,000	1,644,145,419	99.41%
	2350.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	638,000	638,000	100.00%
	2351.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	55,471,000	55,181,100	99.48%
	2352.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	354,383,000	351,311,500	99.13%
	2353.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	808,140,000	806,826,843	99.84%
	2355.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	-	-	#DIV/0!
	2355.EAG	Layanan Hukum	Hukum	435,228,000	430,187,976	98.84%
	IKU7	Jumlah Unit kerja Ditjen. PSDKP berpredikat menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)		188,906,750	187,623,115	99.32%
	2355.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Ortala	188,906,750	187,623,115	99.32%
	IKU8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)		4,286,311,000	4,224,017,758	98.55%
	2355.EAF	Layanan SDM	SDM	2,050,495,000	2,009,730,230	98.01%
	2355.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Diklat	2,235,816,000	2,214,287,528	99.04%
	IKU9	Nilai PM AKIP Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)		4,464,519,667	4,380,085,038	98.11%
	2355.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Perencanaan dan Penganggaran	2,893,385,000	2,840,756,312	98.18%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan, BMN	917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.EAJ	Layanan Data dan Informasi	Data	653,800,000	646,495,795	98.88%
	IKU10	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik		188,906,750	187,623,115	99.32%
	2355.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Ortala	188,906,750	187,623,115	99.32%
	IKU11	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun anggaran 2019 (%)		225,772,958,000	223,420,094,682	98.96%
	2355.EAC	Layanan Umum	Layanan umum, PBJ, persuratan, rapat	12,623,077,000	12,468,650,942	98.78%
	2355.EAA	Layanan Perkantoran	Gaji dan Ops	213,149,881,000	210,951,443,740	98.97%
	IKU12	Level maturitas SPIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (level)		917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan,	917,334,667	892,832,931	97.33%
	IKU13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PSDKP		917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan, BMN	917,334,667	892,832,931	97.33%
	IKU14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PSDKP		11,784,654,000	11,774,743,918	99.92%
	2355.EAD	Layanan Sarana Internal	Pengadaan	11,784,654,000	11,774,743,918	99.92%

	IKU15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)		188,906,750	187,623,115	99.32%
	2355.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan umum, PBJ, persuratan,	188,906,750	187,623,115	99.32%
	IKU16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)		917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan, BMN	917,334,667	892,832,931	97.33%
	IKU17	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)		917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan, BMN	917,334,667	892,832,931	97.33%
	IKU18	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)		917,334,667	892,832,931	97.33%
	2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Monev, Keuangan,	917,334,667	892,832,931	97.33%

EFISIENSI KINERJA PER SASARAN PROGRAM LEVEL ESELON I

Berdasarkan PMK 22/2021 dengan modifikasi

Nama UE I : DITJEN PSDKP

Nama Sasaran Strategis : Tata Kelola SDKP bertanggung jawab

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$) :

38.2%

Periode : TW 4 Tahun 2021

IKU : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2350.BID	Pengawasan dan Pengendalian kelompok Masyarakat	38	52	137%	712,510,000	707,702,527	975,013,684	267,311,157
2350.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1,050	1,193	114%	1,900,500,000	1,879,951,780	2,159,970,559	280,018,779
2351.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	400	450	113%	649,800,000	648,298,339	731,025,000	82,726,661
2352.AEA	Koordinasi	6	6	100%	1,675,072,000	1,670,609,612	1,675,072,000	4,462,388
2352.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	750	830	111%	2,182,800,000	2,179,206,222	2,415,632,000	236,425,778
2352.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	305	551	181%	2,350,169,000	2,303,657,104	4,245,715,144	1,942,058,040
2352.BKB	Pemantauan produk	72	72	100%	3,588,842,000	3,573,136,432	3,588,842,000	15,705,568
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	385	644	167%	3,498,064,000	3,454,878,703	5,851,307,055	2,396,428,352
2353.AEA	Koordinasi	2	2	100%	877,860,000	875,676,354	877,860,000	2,183,646
2353.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	325	361	111%	1,162,030,000	1,159,506,666	1,290,747,169	131,240,503
2353.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,076	2,078	193%	2,867,839,000	2,800,730,085	5,538,447,437	2,737,717,352
2353.BKB	Pemantauan produk	48	48	100%	3,619,069,000	3,614,404,381	3,619,069,000	4,664,619
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20,923	32,911	157%	7,074,009,000	6,930,729,555	11,127,270,099	4,196,540,544
TOTAL					32,158,564,000	31,798,487,760	44,095,971,147	12,297,483,387

EFISIENSI KINERJA PER SASARAN PROGRAM S LEVEL ESELON I

Berdasarkan PMK 22/2021 dengan modifikasi

Nama UE I : DITJEN PSDKP

Nama Sasaran Strategis : Pengawasan SDKP yang integratif

Efisiensi Sasaran Strategis ($\Sigma(9)/(6)$) :

25.5%

Periode : TW 4 Tahun 2021

IKU 1. Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing; 2) Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
IKU	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)							
2350.BKB	Pemantauan produk	29	29	100%	1,413,120,000	1,380,878,978	1,413,120,000	32,241,022
2350.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan	57	58	102%	670,333,000	615,756,825	682,093,228	66,336,403
2350.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan	6	6	100%	1,185,352,000	1,178,551,586	1,185,352,000	6,800,414
2350.QHD	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam	2,981	4,114	138%	275,803,556,000	274,009,813,825	380,589,940,581	106,580,126,756
2350.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan	7	7	100%	28,163,606,000	28,111,721,087	28,163,606,000	51,884,913
2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan	12	10	87%	17,251,037,000	17,128,525,444	15,022,921,813	- 2,105,603,631
2350.RCG	OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	129	136	105%	109,172,027,000	108,129,767,313	114,949,342,965	6,819,575,652
IKU	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)							
2351.AEA	Koordinasi	19	21	111%	7,436,184,000	7,380,318,647	8,218,940,211	838,621,564
2351.BCE	Penanganan Perkara	492	596	121%	9,317,235,000	8,395,449,889	11,286,731,829	2,891,281,940
2351.BKB	Pemantauan produk	72	72	100%	1,745,245,000	1,738,758,079	1,745,245,000	6,486,921
TOTAL					452,157,695,000	448,069,541,673	563,257,293,627	115,187,751,954

EFISIENSI KINERJA PER SASARAN STRATEGIS LEVEL ESELON I

Berdasarkan PMK 22/2021 dengan modifikasi

Nama UE I : DITJEN PSDKP

Nama Sasaran Strategis : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPSDKP

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$) :

5.9%

Periode : TW 4 Tahun 2021

15 INDIKATOR KINERJA

No	Output Program pada SS tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2350.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	1	100%	1,646,740,000	1,624,972,669	1,646,740,000	21,767,331
2350.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	1	100%	638,000	638,000	638,000	-
2351.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	2	100%	55,471,000	55,181,100	55,471,000	289,900
2352.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	5	100%	354,383,000	351,311,500	354,383,000	3,071,500
2353.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	4	100%	808,140,000	806,826,843	808,140,000	1,313,157
2355.EAG	Layanan Hukum	1	1	100%	435,228,000	430,187,976	435,228,000	5,040,024
2355.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna	7	7	100%	755,627,000	750,492,460	755,627,000	5,134,540
2355.AEC	Kerja sama	2	2	100%	206,070,000	205,482,555	206,070,000	587,445
2355.EAF	Layanan SDM	1,316	2,739	208%	2,050,495,000	2,009,730,230	4,267,709,578	2,257,979,348
2355.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	210	773	368%	2,235,816,000	2,214,287,528	8,229,932,229	6,015,644,701
2355.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Ir	50	50	100%	2,893,385,000	2,840,756,312	2,893,385,000	52,628,688
2355.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	140	140	100%	5,504,008,000	5,356,997,587	5,504,008,000	147,010,413
2355.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	1	100%	653,800,000	646,495,795	653,800,000	7,304,205
2355.EAC	Layanan Umum	52	52	100%	12,623,077,000	12,468,650,942	12,623,077,000	154,426,058
2355.EAA	Layanan Perkantoran	31	31	100%	213,149,881,000	210,951,443,740	213,149,881,000	2,198,437,260
2355.EAD	Layanan Sarana Internal	1,111	1,510	136%	11,784,654,000	11,774,743,918	16,016,946,481	4,242,202,563
TOTAL					255,157,413,000	252,488,199,155	267,601,036,287	15,112,837,132

98.95389524

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif